



**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP GOOD GOVERNANCE  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI KASUS INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH DATAR)**

**THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL ON GOOD GOVERNANCE  
AND ITS IMPACT ON LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE  
(CASE STUDY OF THE TANAH DATAR DISTRICT INSPECTORATE)**

تأثير الرقابة الداخلية على الحوكمة الرشيدة وأثرها على أداء الحكومة المحلية (دراسة حالة مفتشية  
محافظة تاناه داتار)

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Program Studi Akuntansi Syariah*

**Oleh:**

**MESI ANANDA**  
**2130403055**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

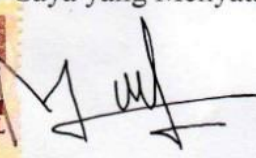
Nama : Mesi Ananda  
NIM : 2130403055  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap *Good Governance* dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Tanah Datar)”** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, 15 Agustus 2025  
Saya yang Menyatakan,



  
**Mesi Ananda**  
**NIM. 2130403055**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: Mesi Ananda, NIM: 2130403055 dengan judul "*Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Good Governance dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Tanah Datar)*". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tahap Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2025

**Ketua Program Studi**

**Akuntansi Syariah**



**Elsa Fitri Amran, M. Si., CertSF**  
NIP. 19870620 201903 2 009

**Pembimbing**


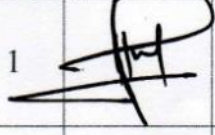



**Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si**  
NIP. 19750823 200312 1 004

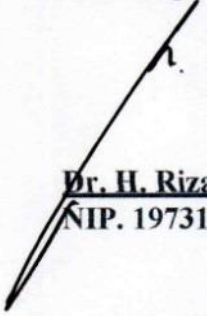
### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Mesi Ananda NIM 2130403055** judul: **“Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap *Good Governance* dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Tanah Datar”** telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Program Studi Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 197508232003121004	Ketua Sidang/ Pembimbing		27/8/2025
2.	Mega Rahmi, SE.Sy., M.Si NIP. 199001272020122008	Penguji 1		27.8.2025
3.	Atika Amor, S.E., M.Si NIP. 199203282020122014	Penguji 2		25/08/25

Batusangkar,                      Agustus 2025  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus  
Batusangkar

  
**Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP**  
NIP. 197310072002121001

## BIODATA PENULIS



### **Data Pribadi**

Nama : Mesi Ananda  
Nim : 2130403055  
Tempat/Tanggal Lahir : Barulak/ 6 Juni 2002  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Jorong Kapuak Koto Panjang Ponco, Nagari Barulak,  
Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar

### **Pendidikan Formal**

Tahun 2009-2015 : SDN 40 Kapuak Koto Panjang Ponco  
Tahun 2015-2018 : MTsN 14 Tanah Datar  
Tahun 2018-2021 : MAN 2 Payakumbuh  
Tahun 2021-2025 : Mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Syariah UIN  
Mahmud Yunus Batusangkar

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segenap cinta dan kasih sayang serta ucapan syukur kepada Allah SWT. Berkat kasih sayangnya yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan. Atas karunia yang diberikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

### **Ayah dan Ibu Tercinta**

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk Ayah Etriadi dan Ibu Dedes Wita Yenti tercinta. Dua sosok yang menjadi alasan terbesarku untuk tidak menyerah. Disetiap lelahku, ada doa kalian yang menjadi penopang. Di aetiap lelahku, ada restu kalian yang menjadi penerang. Ayah, Ibu, terimakasih atas cinta yang tak pernah habis, atas pengorbanan yang tak terhitung, dan atas doa yang mengantarkanku hingga titik ini. Semoga keberhasilan kecil ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kalian berdua.

### **Adik**

Teruntuk Adikku Jeni Ananda terimakasih telah menjadi sumber semangat dan alas an bagiku untuk berjuang. Dalam setiap langkah, ada doa-doamu yang tulus dan senyummu yang selalu memberi kekuatan. Semoga keberhasilanku ini dapat menjadi contoh dan motivasi agar kita sama-sama berani bermimpi dan berjuang meraih masa depan yang lebih baik.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Bapak Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih banyak sudah memdedikasi, mengarahkan, memotivasi, menasehati, membimbing sehingga penulis sudah ditahap ini. Terimakasih atas waktu yang sangat berharga dalam proses skripsi ini. Semoga Allah balaskan berlipat ganda atas kebaikan dan ilmu yang Ibu berikan.

### **Dosen Penguji Skripsi**

Kepada Ibu Mega Rahmi, SE., S.y, M.Si dan Ibu Atika Amor, S.E., M.Si selaku dosen penguji dalam skripsi ini, terimakasih banyak sudah memberikan masukan, kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan ilmu yang telah Bapak berikan.

### **Penasehat Akedemik**

Terimakasih kepada Ibu Nita Fitria, SE.I., MA, CIFA selaku penasehat akademik yang telah membantu membimbing selama perkuliahan ini

### **Teman-Teman Penulis**

Meizahra Dilla, M Rangga Putra, Natasa Wulan Jeniva, dan teman-teman Kos terima kasih telah menjadi tempat berbagi tawa, keluh kesah, dan semangat di kala lelah. Terimakasih atas doa, dukungan serta kebersamaan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.

### **Teruntuk Diriku**

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini kupersembahkan untuk diriku sendiri. Untuk setiap lelah yang tidak terlihat, setiap air mata yang tertaha, serta doa-doa yang diam-diam terucap dalam hati. Terimakasih untuk diriku yang tidak pernah menyerah meski jalan terasa berat. Terimakasih telah berjuang sejauh ini, tetap berdiri tegak dan membuktikan bahwa mimpi bisa diraih dengan usaha dan doa. Semoga ini menjadi pengingat bahwa aku mampu dan aku berhak untuk terus melangkah lebih jauh.

## ABSTRAK

**Mesi Ananda. NIM 2130403055. Judul Skripsi “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap *Good Governance* dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Tanah Datar).** Program Studi Akuntansi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang berpotensi melemahkan pengendalian internal dan berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Tujuan pembahasan ini untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap *good governance* dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *causal-explanatory* untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan program IBM SPSS versi 27. Teknik analisis data meliputi uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), serta uji hipotesis menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) dan *Sobel Test*

Dari penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap *good governance*. Demikian pula, *good governance* terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, pengendalian internal juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Lebih lanjut, ditemukan bahwa pengendalian internal secara tidak langsung berpengaruh signifikan dan positif melalui kinerja pemerintah daerah terhadap *good governance*. Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.684 mengindikasikan bahwa 68.4% variabilitas *good governance* dapat dijelaskan oleh pengendalian internal, dengan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

**Kata Kunci:** Pengendalian Internal, *Good Governance*, Kinerja Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Tanah Datar

## **ABSTRACT**

**Mesi Ananda. NIM 2130403055. Thesis Title: "The Influence of Internal Control on Good Governance and Its Impact on Regional Government Performance (Case Study at the Tanah Datar Regency Inspectorate)." Thesis. Sharia Accounting Study Program. Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.**

*The main problem in this thesis is that the Tanah Datar Regency Inspectorate still faces constraints such as limited human resources and budget, which have the potential to weaken internal control and impact regional government performance. The purpose of this discussion is to analyze the influence of internal control on good governance and its impact on regional government performance at the Tanah Datar Regency Inspectorate.*

*This research uses a quantitative approach with a causal-explanatory research type to test the cause-and-effect relationship between variables. The data collection technique used by the author is through distributing questionnaires and analyzed using IBM SPSS version 27. Data analysis techniques include data quality tests (validity and reliability), classical assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity), and hypothesis testing using path analysis and Sobel Test.*

*The author's research shows that internal control has a significant and positive influence on good governance. Likewise, good governance has been shown to have a significant and positive influence on local government performance. In addition, internal control has also been proven to have a positive and significant effect on the performance of local governments. Furthermore, it was found that internal control indirectly has a significant and positive influence on good governance through local government performance. The coefficient of determination (R Square) of 0.684 indicates that 68.4% of the variability in good governance can be explained by internal control, with the remainder influenced by other factors.*

**Keywords:** *Internal Control, Good Governance, Regional Government Performance, Tanah Datar Regency Inspectorate.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “**Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap *Good Governance* dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Tanah Datar)**”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis, sehingga tidak menutup kemungkinan di dalam penulisan skripsi ini terdapat ketidak sempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan dan saran sebagai masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada **Ayahanda Etriadi** dan **Ibunda Dedes Wita Yenti**, yang selalu memberikan doa serta dukungan. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Elsa Fitri Amran, M.Si., CertSF** Ketua Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Nita Fitria, S.E. I. MA** Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan motivasi, arahan kepada penulis.

5. **Dr. Nasfizar Guspenri, SE., M.Si** Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat berjasa dalam penulisan skripsi ini, beliau telah membimbing, memberikan ide, saran dan motivasi yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, ditengah kesibukkan beliau dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Mega Rahmi, S.E, Sy., M.Si** selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Atika Amor, S.E., M.Si** selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan.
9. **Inspektorat Kabupaten Tanah Datar** yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian sehingga dapat membantu jalannya penelitian penulis.
10. **Jeni Ananda** selaku saudara kandung saya yang telah memberikan dukungan dan semangat.
11. Kepada para sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kepeduliannya serta memberikan solusi dan semangat dengan tulus selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberikan pahala atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Batusangkar, Agustus 2025  
Penulis

**Mesi Ananda**  
**NIM.2130403055**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENNGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	6
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	7
G. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Pengendalian Internal .....	9
2. <i>Good Governance</i> (GG).....	18
3. Kinerja Pemerintah Daerah.....	25
B. Penelitian Relevan .....	29
C. Kerangka Berfikir .....	33
D. Hipotesis .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	37

C. Populasi Dan Sampel.....	38
D. Pengembangan Instrumen.....	38
E. Sumber Data .....	47
F. Teknik Pengumpulan Data .....	48
G. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Profil Inspektorat Kabupaten Tanah Datar .....	54
1. Sejarah Terbentuknya Inspektorat Kabupaten Tanah Datar .....	54
2. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar .....	54
3. Srtuktur Inspektorat Kabupaten Tanah Datar .....	55
B. Hasil Penelitian.....	61
1. Uji Kualitas Data .....	61
2. Uji Asumsi Klasik.....	67
3. Uji Hipotesis .....	70
4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	74
C. Pembahasan .....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal kegiatan Penelitian .....	37
Tabel 3. 2 Skor Kuesioner.....	39
Tabel 3. 3 Kisi-Kisi kuesioner .....	39
Tabel 4. 1 Uji Validitas variabel Pengendalian Internal .....	61
Tabel 4. 2 Uji Validitas variabel <i>Good Governance</i> .....	62
Tabel 4. 3 Uji Validitas variabel Kinerja Pemerintah Daerah .....	63
Tabel 4. 4 Uji Realibilitas variabel Pengendalian Internal .....	64
Tabel 4. 5 Uji Realibilitas variabel <i>Good Governance</i> .....	65
Tabel 4. 6 Uji Realibilitas variabel Kinerja Pemerintah Daerah.....	66
Tabel 4. 7 Uji Normalitas.....	68
Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas .....	69
Tabel 4. 9 Uji variabel Y dan Z.....	71
Tabel 4. 10 Uji variabel X dan Z .....	71
Tabel 4. 11 Uji variabel X, Y dan Z.....	72
Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Pengaruh Langsung .....	72
Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung .....	74
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	33
Gambar 4. 1 Struktur Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.....	55
Gambar 4. 2 Grafik <i>Plot Scatter</i> .....	70
Gambar 4. 3 Sobel Test.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sistem pengendalian internal yang andal guna memastikan bahwa kegiatan operasional dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip *good governance*. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel, peran pengendalian internal menjadi sangat krusial, terutama dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan, serta menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam hal efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pemerintah daerah, sistem pengendalian internal yang efektif sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, serta pemborosan anggaran publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern)

*Good governance* merupakan proses untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang baik oleh tata kelola yang baik. Hal tersebut memuat karakteristik yang memiliki efek positif pada berbagai aspek pemerintah, baik lokal maupun pusat, termasuk kebijakan konsultasi (perundingan) dan praktik, prosedur pertemuan, protokol (tata cara) kualitas pelayanan, perilaku anggota dewan dan pejabat, klarifikasi tugas dan hubungan kerja yang baik. Pemerintahan yang baik adalah proses dimana institusi-institusi publik melaksanakan urusan publik, mengelola sumber daya publik dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia yang pada dasarnya terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta dengan memperhatikan norma hukum. (Solikhudin, 2022)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keberadaan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat penting. Inspektorat berfungsi untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan. Di Kabupaten Tanah Datar, Inspektorat menjadi garda terdepan dalam menjamin bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan fungsi-fungsi pengendalian yang sesuai standar. Dengan menjalankan fungsi tersebut secara optimal, Inspektorat berkontribusi langsung terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan pemerintah daerah. Namun, pada kenyataannya, efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat seringkali terkendala oleh berbagai faktor, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun kapasitas kelembagaan.

Di Kabupaten Tanah Datar, permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat adalah masih terbatasnya jumlah tenaga aparat pengawasan serta sumber daya manusia yang tersedia jika dibandingkan dengan banyaknya objek pemeriksaan yang harus diawasi. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan anggaran, yang menyebabkan kegiatan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Keterbatasan

sumber daya manusia maupun anggaran berdampak langsung pada lemahnya sistem pengendalian internal. Jumlah aparatur yang sedikit dan kompetensi yang belum memadai menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, sehingga aktivitas kontrol hanya berfokus pada aspek administratif dan belum mampu menjangkau pencegahan penyimpangan secara menyeluruh. Demikian pula, keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan audit, pembinaan, serta pemantauan yang seharusnya rutin dilakukan. Akibatnya, sistem pengendalian internal menjadi kurang efektif dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi.

Sumber daya yang terbatas juga berimplikasi pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Misalnya, kurangnya tenaga pengawasan menyebabkan rendahnya kualitas transparansi dan akuntabilitas, karena tidak semua program dapat diawasi dengan baik. Keterbatasan anggaran membuat ruang lingkup partisipasi publik, kualitas layanan, dan mekanisme pertanggungjawaban menjadi terbatas. Dengan kata lain, kondisi ini melemahkan penerapan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas yang menjadi inti *good governance*.

Keterbatasan sistem pengendalian internal dan lemahnya penerapan *good governance* pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan yang tidak optimal membuka peluang terjadinya inefisiensi anggaran, penyimpangan administrasi, serta menurunnya kualitas pelayanan publik. Rendahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya bukan hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga dapat melemahkan fondasi kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Ketidakseimbangan antara beban kerja yang tinggi dengan keterbatasan kapasitas sumber daya yang tersedia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, berdampak langsung pada efektivitas fungsi pengawasan. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan pengawasan cenderung bersifat reaktif, hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif dan

kepatuhan formal, serta belum mampu menjangkau aspek strategis yang berperan penting dalam mendorong perbaikan sistemik tata kelola pemerintahan. Akibatnya, fungsi pengendalian risiko menjadi kurang optimal, peluang terjadinya penyimpangan semakin meningkat, dan tujuan pembangunan daerah berisiko tidak tercapai secara maksimal. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan, baik melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyempurnaan mekanisme kerja, maupun pemanfaatan teknologi informasi guna mendorong pendekatan pengawasan yang lebih proaktif, berbasis risiko, dan berorientasi pada hasil.

Kondisi tersebut menyebabkan Inspektorat belum dapat secara optimal melaksanakan perannya dalam memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintahan berjalan sesuai prinsip *good governance*. Hal ini tentu berdampak langsung pada kinerja pemerintah daerah, baik dari sisi pengelolaan anggaran, pelayanan publik, maupun pencapaian target pembangunan daerah. Keterbatasan ini juga menghambat kemampuan Inspektorat untuk memberikan rekomendasi yang proaktif dan strategis, yang seharusnya dapat mencegah masalah sebelum terjadi dan mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Inspektorat, baik dari segi sumber daya maupun metodologi pengawasan, menjadi krusial untuk memastikan tercapainya pemerintahan yang efektif dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Inspektorat, baik dari segi sumber daya maupun metodologi pengawasan, menjadi krusial untuk memastikan tercapainya pemerintahan yang efektif dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat

Penelitian mengenai pengendalian internal, *good governance*, dan kinerja pemerintah daerah telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih terfokus pada hubungan parsial antarvariabel. Misalnya, penelitian Rahmani (2023) hanya meneliti pengaruh pengendalian internal dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah di Kota Bandung tanpa melibatkan peran mediasi, sedangkan Mattoasi dkk. (2021) meneliti pengaruh

sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah Gorontalo tanpa memasukkan variabel *good governance*. Dengan demikian, terdapat kesenjangan teoritis dimana keterkaitan ketiga variabel tersebut belum diuji secara komprehensif, khususnya melalui pendekatan analisis jalur untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung.

Selain itu, penelitian Pratama & Rahmadoni (2023) memang sudah menggunakan analisis jalur, tetapi fokus pada pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, bukan pada kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kontekstual, karena penelitian di level kabupaten dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, seperti pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, masih jarang dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk menutup gap dengan mengkaji pengaruh pengendalian internal terhadap *good governance* serta dampaknya pada kinerja pemerintah daerah, menggunakan *path analysis* dan *Sobel Test* sehingga mampu memberikan temuan yang lebih mendalam.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk menganalisis **pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan *good governance* dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dengan mengambil studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengendalian internal oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara optimal.
2. Terbatasnya jumlah tenaga pengawasan dan sumber daya manusia dalam Inspektorat tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan.
3. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan yang efektif.

4. Kurangnya efektivitas pengawasan internal berpotensi menghambat implementasi prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan pemerintah daerah.
5. Lemahnya pengendalian internal dapat berdampak pada menurunnya kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar terhadap pelaksanaan *good governance*, serta dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Objek penelitian terbatas pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah.
3. Penelitian ini tidak membahas sistem pengendalian internal pada OPD secara langsung, tetapi difokuskan pada peran Inspektorat sebagai pelaksana pengawasan internal.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap *good governance* dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah pada inspektorat Kabupaten Tanah Datar?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap *good governance* dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah pada inspektorat Kabupaten Tanah Datar.

## **F. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik, manajemen pemerintahan, dan tata kelola organisasi publik. Hasil penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan pengendalian internal, *good governance*, dan kinerja pemerintah daerah, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara sistem pengawasan internal dan efektivitas pemerintahan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah daerah secara umum dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi penguatan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pendampingan guna mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* serta peningkatan kinerja pemerintah daerah.

### **2. Luaran Penelitian**

Adapun luaran penelitian dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan menambah daftar buku pada perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Pengendalian Internal**

Pengendalian internal adalah sistem, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan oleh suatu organisasi atau lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, serta aktivitas operasional dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pengendalian internal diukur melalui lima indikator utama yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

### **2. Good Governance (GG)**

*Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, *good governance* diukur berdasarkan delapan prinsip utama yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi konsesus, keadilan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas.

### **3. Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja pemerintah daerah adalah sejauh mana pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Kinerja ini mencakup banyak hal, seperti penyelenggaraan administrasi, pengelolaan anggaran, implementasi kebijakan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, kinerja pemerintah daerah diukur melalui empat indikator yaitu *input*, *output*, *outcome* dan dampak.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengendalian Internal**

###### **a. Pengertian Pengendalian Internal**

Secara luas COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut “*internal control is a process effected by on entitty’s board of directors, management, and other personal, designal to provide reasonable assurance regarding the acvieverment of objectives relating to operations, reporting, and compliance*” yang berarti pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi/dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya, yang dirancang untuk memberikan asurans atau keyakinan yang memadai tentang capaian atau tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan). (Tuanakotta, 2019)

Pemerintah Indonesia mengadopsi pengendalian internal seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mendefinisikan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melauai kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam suatu organisasi atau lembaga, termasuk pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam hal efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal dapat disimpulkan sebagai suatu sistem, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa aktivitas operasional dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencegah penyalahgunaan wewenang, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. (Kewo, 2024)

Dari beberapa pernyataan pengendalian internal di atas, pengendalian internal dapat disimpulkan sebagai suatu proses secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan terhadap laporan keuangan dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku dalam berbagai jenis organisasi.

#### **b. Tujuan Pengendalian Internal**

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan proses yang dilakukan oleh instansi pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pengendalian intern yang baik, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Tujuan lain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah untuk:

- 1) Menilai tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 2) Memberikan keyakinan kepada Pimpinan Instansi dalam pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan pernyataan mengenai efektivitas

pengendalian intern dan memberikan keyakinan kepada stakeholder lain bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

- 3) Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Instansi menyangkut perbaikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masa yang akan datang.(Natsir dkk, 2024)

### **c. Manfaat Pengendalian Internal**

Pengendalian internal bermanfaat untuk organisasi disebabkan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi, serta memastikan bahwa semua proses operasional berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pengendalian internal juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, keuangan, maupun material, sehingga organisasi dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, organisasi dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek operasionalnya. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja dan integritas organisasi secara keseluruhan. Pengendalian internal bermanfaat untuk organisasi disebabkan kemampuannya untuk:

- 1) Mencegah atau setidaknya mengurangi kejadian perilaku yang tidak diinginkan atau menghilangkan perilaku yang terjadi.
- 2) Menurunkan biaya yang tidak diinginkan atau meniadakan biaya yang terjadi.
- 3) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

- 4) Memastikan keandalan pelaporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan akurat dan dapat dipercaya.
- 5) Sistem pengendalian internal yang efektif sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel.

Keterbatasan dari sistem pengendalian internal ialah:

- 1) Ketidaksesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan, yang merupakan pra-kondisi bagi pengendalian internal. Tujuan yang semula dibuat dan yang menjadi dasar dari aturan pengendalian internal, kemudian diubah atau berubah. Perubahan ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan dan pengendalian internal.
- 2) Kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Pimpinan organisasi mencoba menyederhanakan pengambilan keputusan, pendekatan ini mengandung kelemahan karena membatasi seseorang menggunakan akal dan pikiran.
- 3) Kesalahan pembukuan bisa terjadi karena kesalahan manusia. Kesalahan ini sering terjadi karena rutinitas, kejenuhan dan tidak konsentrasi.
- 4) Persekongkolan di antara berbagai pihak menyebabkan pemisahan tugas menjadi tidak berfungsi. Persekongkolan menghancurkan sistem pengendalian internal yang sebaik apapun. (Tuanakotta, 2019)

#### **d. Komponen Pengendalian Internal**

Komponen dari sistem pengendalian intern ini sudah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimana terdapat 5 komponen penting di dalamnya:

##### 1) Lingkungan Pengendalian

Komponen ini merupakan pondasi awal untuk membangun sistem *internal controls* dengan menyediakan disiplin dan struktur

yang bersifat fundamental. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu instansi dan memengaruhi kesadaran personel instansi tentang pengendalian. Pemimpin dari sebuah instansi pemerintah dan juga semua pegawai tersebut harus menciptakan dan juga memelihara lingkungan di semua keseluruhan organisasi yang bisa menciptakan perilaku yang mendukung manajemen melalui beberapa langkah seperti:

- a) Penegakan etika dan integritas
- b) Komitmen tinggi kepada kompetensi
- c) Kepemimpinan kondusif
- d) Struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan
- e) Pendelegasian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang tepat dan sesuai
- f) Penerapan kebijakan yang disusun secara sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia
- g) Peran aparat dalam pengawasan intern yang efektif
- h) Hubungan kerja yang baik.

## 2) Penilaian resiko

Pengendalian internal harus menyajikan penilaian yang komprehensif atas berbagai risiko yang harus ditanggulangi, baik yang berasal dari dalam organisasi atau lembaga itu sendiri maupun yang muncul dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka melakukan penilaian risiko yang efektif dan menyeluruh, pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur pada setiap tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan konteks dan dinamika lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dengan demikian, penilaian risiko tidak hanya menjadi sebuah formalitas, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis, sehingga

dapat memastikan bahwa semua potensi risiko dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

### 3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan ini akan membantu dalam memastikan bahwa arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan, sehingga setiap langkah yang diambil dalam proses implementasi dapat selaras dengan visi dan misi organisasi. Dalam konteks ini, kegiatan pengendalian yang dilakukan harus disajikan dengan cara yang efektif dan seefisien mungkin, mengingat pentingnya penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengendalian yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi secara keseluruhan, sehingga setiap individu dan unit kerja dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai hasil yang diinginkan

Kegiatan pengendalian ini sendiri terdiri dari:

- a) Review mengenai kinerja instansi pemerintah
- b) Pembinaan SDM
- c) Pengendalian dari sistem informasi yang dikelola
- d) Review mengenai indikator dan juga ukuran kerja
- e) Pemisahan fungsi dan juga wewenang

- f) Otorisasi serta transaksi pada kejadian yang cukup penting
  - g) Pencatatan yang akurat dan juga tepat waktu mengenai kejadian dan juga transaksi tersebut
  - h) Pembatasan akses atas sumber daya dan juga catatannya
  - i) Akuntabilitas mengenai sumber daya
  - j) Dokumentasi pada Sistem pengendalian Intern dan juga transaksi yang penting.
- 4) Komunikasi dan Informasi

Informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan makna dan konteks yang relevan, sehingga dapat digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, yang mencakup berbagai aspek operasional, administratif, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mendukung pimpinan dan pegawai dalam merumuskan kebijakan, merencanakan program, serta mengevaluasi hasil dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Sementara itu, komunikasi merupakan proses yang kompleks dan dinamis dalam penyampaian pesan atau informasi, yang dilakukan dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung melalui interaksi tatap muka maupun tidak langsung melalui berbagai media komunikasi, seperti surat, email, atau platform digital lainnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima dan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Proses komunikasi yang efektif tidak hanya melibatkan pengiriman informasi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mendengarkan dan merespons dengan tepat, sehingga tercipta dialog yang produktif dan saling memahami antara semua pihak yang terlibat, yang akan memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mencapai tujuan bersama.

Informasi yang relevan dan akurat harus dilaporkan kepada pimpinan instansi serta pihak lain yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga setiap informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam organisasi. Selain itu, informasi yang ditampilkan dan dilaporkan ini juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja, pengukuran pencapaian tujuan, dan pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaporan informasi yang sistematis dan transparan akan mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan instansi pemerintah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas organisasi.

#### 5) Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya bertujuan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern yang diterapkan pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sesuai dengan harapan dan standar yang ditetapkan, serta untuk mengevaluasi apakah perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan organisasi. Proses pemantauan ini tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang ada, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kualitas kerja dari waktu ke waktu, yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi operasional instansi tersebut. Selain itu, hasil dari proses pemantauan ini juga berfungsi sebagai rekomendasi yang berharga, yang dihasilkan dari audit dan review yang dilakukan secara berkala, sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, pemantauan yang dilakukan secara sistematis dan terencana akan memungkinkan instansi pemerintah untuk mengidentifikasi potensi masalah atau

kelemahan dalam sistem pengendalian intern, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu tersebut, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. (Hidayat, 2021)

**e. Tipe Pengendalian Internal**

Ada banyak cara dalam mengklasifikasikan berbagai jenis pengendalian, salah satu caranya dengan mengelompokkan pengendalian sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu fungsi pengendalian dalam perusahaan tersebut sebagai bentuk pencegahan atau pendeteksian perilaku yang tidak diinginkan. Pengendalian pencegahan diterapkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan yang tidak diinginkan. Jika pengendalian pencegahan efektif maka bentuk pengendalian ini sangat kuat karena biayanya relatif kecil dan dapat sangat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Pengendalian pendeteksian dilakukan setelah terjadinya perilaku kesalahan dan penyelewengan. Pengendalian pendeteksian dapat efektif jika dilakukan tepat waktu dan hasil-hasilnya dapat berfungsi untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan dan mengoreksi dampak tindakan yang berbahaya tersebut.

Cara lain untuk mengklasifikasikan pengendalian adalah niat pengendalian internal, yang pengendalian internalnya dirancang untuk mencapai tujuan pengendalian tertentu sehingga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pengendalian spesifik atau pengendalian primer, adalah pengendalian yang diterapkan pada bagian proses transaksi dan penanganan aset yang dapat terjadi kesalahan atau penyimpangan dan pengendalian umum atau pengendalian sekunder, adalah pengendalian yang dimaksudkan untuk memberikan lingkungan yang kondusif sehingga terciptanya pengendalian internal yang baik, mendukung, dan menjamin fungsi pengendalian

tersebut. Perbedaan antara pengendalian spesifik dan umum dianggap penting disebabkan auditor harus menentukan pengendalian atas tugas-tugas penting sehingga mereka dapat menyatakan sistem pengendalian internal tersebut efektif. (Supriyono, 2018)

## 2. *Good Governance* (GG)

### a. Pengertian *Good Governance* (GG).

*Good Governance* dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks kenegaraan lembaga administrasi negara memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga sinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Jika dikaitkan dengan konteks perusahaan, *good governance* adalah penyelenggaraan perusahaan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga siliritas interaksi yang konstruktif diantara domain-domain perusahaan, dan masyarakat. (Syofyan, 2021)

Pemerintahan yang baik secara konseptual, mempunyai pengertian bahwa kata baik atau *good* dalam istilah kepemimpinan yang baik yang memiliki makna bahwa *good governance* telah mengandung 2 pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, keberlanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan

penyediaan publik *goods and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (kepemimpinan yang baik). Sejalan dengan hal tersebut *governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik.(Sari, 2024)

#### **b. Prinsip-Prinsip Good Governance**

Menurut *United Nations Economic And Social Commission For Asia And The Pacific* (UNESCAP) terdapat 8 prinsip utama *good governance* yaitu:

##### 1) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif oleh seluruh sektor masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait permasalahan yang menjadi kepentingan publik. Partisipasi dapat tumbuh berkembang dengan adanya lingkungan yang memungkinkan tersebar luasnya informasi secara tepat dan tepat sehingga semua orang yang berkepentingan dapat menyuarakan pendapat mereka dengan berbagai cara. Partisipasi, baik oleh laki-laki maupun perempuan merupakan landasan utama tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perantara atau perwakilan yang sah.

##### 2) Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

*Rule of law* merupakan pelaksanaan kekuasaan negara menggunakan standar dan mewujudkan nilai-nilai sosial yang tanpa pandang bulu dan didukung publik secara luas. Artinya ada kerangka hukum undang-undang dan tata tertib sistem keadilan yang independen dan efektif, hak milik dan hak kontrak yang ditegakkan, norma-norma hak asasi manusia diterapkan, dan ada kendala konstitusional pada kekuasaan eksekutif. Selain itu, hukum harus responses terhadap kebutuhan masyarakat, ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Aturan hukum sejati membutuhkan kerjasama

negara dengan masyarakat dan merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks dan mengakar.

### 3) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti bahwa keputusan diambil dan penegakannya dilakukan dengan cara yang mengikuti aturan yang berlaku. Transparansi hadir di mana proses pengambilan keputusan oleh mereka yang berkuasa dapat dinilai dan diawasi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang menerima dampak dari keputusan tersebut dan pelaksanaannya. Informasi yang disediakan harus memadai dan disampaikan dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti. Kunci prinsip transparansi adalah peradilan independen dan pers yang bebas kompetitif dan bertanggung jawab serta masyarakat sipil yang aktif dan kritis.

### 4) Responsivitas (*Responsiveness*)

Mengharuskan institusi dan proses di dalamnya untuk melayani semua pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang wajar. Responsivitas hidup di mana lembaga dan proses melayani semua pemangku kepentingan dengan cara cepat dan tepat sehingga kepentingan semua warga negara dapat terlindungi. Responsivitas juga mengacu pada pengidentifikasi penanganan praktik-praktik diskriminatif yang merugikan kelompok etnis atau mayoritas serta gender tertentu terkait keterlibatan mereka dalam pemerintahan.

### 5) Berorientasi Pada Konsensus (*Konsensus Oriented*)

*Good governance* membutuhkan mediasi dari berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai konsensus yang luas tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi seluruh masyarakat dan bagaimana kepentingan tersebut dapat dicapai titik dengan kata lain memastikan bahwa sistem yang ada dapat melayani kepentingan-kepentingan utama dalam masyarakat. Untuk mencapai

kesepakatan, dibutuhkan struktur mediasi yang kuat dan tidak memihak sehingga kepentingan terbaik masyarakat dapat dipenuhi.

6) Kesetaraan dan Inklusivitas (*Equity And Inclusiveness*)

Kesetaraan dan inklusivitas tercipta ketika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka, yang berarti bahwa semua anggota masyarakat, terutama mereka yang paling rentan, harus dipertimbangkan kepentingannya dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun individu yang merasa terasing, kehilangan haknya, atau tertinggal dalam pembangunan yang berlangsung, sehingga semua suara dapat didengar dan diakomodasi. *Good governance* menuntut agar perhatian khusus diberikan kepada penderitaan orang miskin, mereka yang terpinggirkan, dan kelompok-kelompok yang membutuhkan, dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas hidup semua lapisan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial yang ada.

7) Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah (*Government Eficiency And Efektiveness*)

Efisiensi efektivitas berarti memastikan bahwa proses dan institusi memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya untuk menghasilkan apa yang bernama dibutuhkan oleh masyarakat. Efektivitas dan efisiensi memerlukan peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan publik, profesionalisasi birokrasi, memfokuskan upaya pemerintah pada fungsi peta dan penghapusan tumpang tindih fungsi dan operasi. Untuk penyampaian layanan publik lembaga harus segera dan memadai dalam memenuhi kebutuhan warga menyederhanakan prosedur pemerintahan dan mengurangi birokrasi, menggunakan teknologi tepat guna memungkinkan, serta mengoordinasikan proses di antara berbagai

lembaga pemerintah untuk menghilangkan kebutuhan informasi yang berlebihan. Efektivitas dan efisiensi juga menuntut agar tujuan kerja individu dapat diselaraskan dengan program dan tujuan lembaga.

#### 8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang atau kelompok bertanggung jawab atas tindakan mereka terutama ketika tindakan tersebut mempengaruhi kepentingan umum, ini mengacu pada pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan di pemerintahan sekitar swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan jawaban kepada publik serta pemangku kepentingan institusional. Untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas, diperlukan adanya kode etik dan SOP dalam mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik. (Danar, 2022)

#### c. Tujuan *Good Governance*

Tujuan pokok dari *good governance* adalah untuk mencapai kondisi pemerintahan atau perusahaan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga mampu menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang, dengan melibatkan kerjasama yang sinergis antar semua pihak atau stakeholder yang terkait, termasuk negara, perusahaan, masyarakat madani, dan sektor swasta. *Good governance* berupaya menciptakan suatu sistem yang inklusif, di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam proses pengambilan keputusan, serta dapat berkontribusi secara aktif dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, *good governance* juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan pemerintahan dan perusahaan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi dan proses yang ada.

Penerapan pelaksanaan prinsip *good governance* secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. Serta tujuan *good governance* adalah penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat. Tujuan lain dari *good governance* adalah tercapainya sasaran yang telah ditetapkan aktiva pemerintahan dijaga dengan baik pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat kegiatan pemerintah dilakukan dengan transparan.(Sari, 2024)

#### **d. Manfaat *Good Governance***

Penerapan *good governance* memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, dan manfaatnya dapat membawa perubahan positif yang signifikan tidak hanya bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tetapi juga bagi masyarakat umum secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi, serta mendorong partisipasi aktif dari warga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Penerapan *good governance* juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan sinergi yang produktif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. *Good governance* memiliki beberapa manfaat di antara lain:

##### 1) Meminimalkan *agency cost*

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang dapat mencakup berbagai jenis kerugian yang berpotensi merugikan instansi pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk biaya ini adalah kerugian yang muncul ketika pemerintah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi atau

kelompok tertentu, yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik. Selain itu, pendelegasian wewenang yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya, sehingga mengakibatkan pemborosan dan mengurangi efektivitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

## 2) Meningkatkan kinerja pemerintahan

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan berada dalam kondisi yang sehat akan mampu menciptakan kepercayaan dan simpati di kalangan masyarakat, sehingga mendorong mereka untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah berkomitmen untuk melayani dan memenuhi kebutuhan mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan pemerintahan, baik melalui partisipasi dalam forum-forum diskusi, pemilihan umum, maupun program-program pembangunan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menciptakan sinergi yang positif antara pemerintah dan warga, yang pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## 3) Memperbaiki Citra pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah di masyarakat serta lingkungan sekitarnya, karena citra yang positif dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga. Penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap institusi pemerintahan, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dengan meningkatkan citra dan reputasi pemerintah melalui praktik

*good governance*, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama. (Sari, 2024)

#### **e. Karakteristik *Good Governance***

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah ormaswasta dan masyarakat terutama bekerja sama adalah pengaturan kehidupan sosial politik sosial ekonomi.
- 2) Komunikasi adanya jaringan multisistem (pemerintah swasta dan masyarakat) dia melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
- 3) Proses penguatan diri sendiri ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan.
- 4) Alam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi
- 5) Keseimbangan kekuatan, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ketika elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas harmoni dan kerjasama
- 6) Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan dinamis antara pemerintah Komnaw swasta dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. (Danar, 2022)

### **3. Kinerja Pemerintah Daerah**

#### **a. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah efektivitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, disiplin dan inisiatif. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa dalam hubungannya dengan

kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja tergantung pada sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Demikian juga berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab harus terdelegasi secara baik dan tidak adanya tumpang tindih kewenangan. (Oki, 2023)

Kinerja pemerintah atau organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. (Edowai dkk, 2021)

Muda dkk. (2018) menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok, dengan melalui usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Kinerja pemerintah daerah merujuk pada seberapa efektif, efisien, dan akuntabelnya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal (provinsi, kabupaten, atau kota). Evaluasi kinerja ini penting karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

#### **b. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur *input*, proses, *output*, hasil, dan dampak dari operasi pemerintah. Indikatornya mungkin cukup tinggi, misalnya, ketika menilai kinerja pemerintah dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Milenium (SPM) atau tujuan pembangunan nasional, atau ketika mengukur kegiatan dan keluaran kementerian/lembaga pemerintah. Indikator penting untuk menentukan tujuan kinerja, melacak kemajuan menuju tujuan tersebut, dan membandingkan kinerja unit kerja/organisasi/kementerian/ lembaga yang berbeda. Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing indikator kinerja berdasarkan tingkatan:

- 1) Indikator *input* merupakan segala bentuk sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Input ini mencakup anggaran, jumlah aparatur yang terlibat, sarana dan prasarana, serta bahan pendukung lainnya yang menjadi modal awal pelaksanaan program. Dengan kata lain, input berfungsi untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sumber daya yang cukup bagi terlaksananya kegiatan. Indikator *input* mengukur jumlah sumber daya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan setiap aktivitas seperti anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), sejumlah peralatan, material, dll, yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas.
- 2) indikator *output* adalah hasil langsung dari suatu kegiatan yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. *Output* biasanya berupa produk, layanan, atau dokumen yang dihasilkan oleh instansi pemerintah setelah mengolah *input* yang tersedia. Contohnya adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan yang diselesaikan, jumlah pelatihan yang dilaksanakan, atau jumlah masyarakat yang menerima layanan publik. Indikator ini menekankan pada apa yang

secara nyata dihasilkan pemerintah dalam jangka pendek. Indikator *output* mengukur hasil langsung yang telah dihasilkan dari tiap-tiap kegiatan, baik berbentuk output fisik maupun non fisik.

- 3) Indikator *outcome* mengukur manfaat atau hasil antara yang diperoleh dari output. *Outcome* lebih menekankan pada efek yang dirasakan oleh pihak yang menjadi sasaran program, misalnya meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap aturan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, atau bertambahnya kepuasan masyarakat terhadap program pemerintah. *Outcome* mencerminkan efektivitas kegiatan karena menunjukkan seberapa jauh *output* yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat. Indikator *outcome* mengukur capaian akhir dari setiap kegiatan yang telah terlaksana.
- 4) indikator dampak (*impact*) merupakan ukuran pengaruh jangka panjang dari pelaksanaan program atau kebijakan terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Dampak biasanya terlihat dalam bentuk perubahan sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Misalnya, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, menurunnya tingkat korupsi atau penyimpangan anggaran, serta tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Indikator dampak ini menjadi penting karena menunjukkan kontribusi nyata pemerintah dalam menciptakan perubahan yang lebih besar dan berjangka panjang. Indikator dampak ialah menunjukkan dampak setelah seluruh program atau kegiatan dilaksanakan, baik dampak positif maupun negatif, yang dihasilkan atas seluruh pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan. (Mayasari, 2022)

## B. Penelitian Relevan

Dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah pijakan berupa penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk memperjelas posisi penelitian lanjutan, apakah mendukung, menolak, atau mengambil aspek lain yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang diketahui memiliki relevansi dan metode dengan penelitian yang dikemukakan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya adalah:

1. Tami Nisita Rahmani (2023) “Pengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern serta *Good Government Governance* terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Kota Bandung”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan *good government governance* terhadap kinerja Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 17 instansi yang ada di Kota Bandung. Penilaian kinerja Dinas didasarkan pada indikator “*value for money*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan dukungan *software SPSS* versi 22 *for Windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individual sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Dinas Kota Bandung. Sebaliknya *good government governance* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kinerja Dinas Kota Bandung. Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama melihat pengaruh pengendalian internal dan *good governance* dan kinerja pemerintah. (Rahmani, 2023)

2. Elvindo Rikki Pratama dan Firman Rahmadoni (2023) “Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Terhadap *Good Governance* dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan”

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial analisis pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian intern

terhadap *good governance* dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan di masa pandemi COVID-19 (studi kasus Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuisisioner kepada para pegawai yang ada di Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 157 orang dan jumlah sampelnya sebanyak 123 orang yang menjadi responden dengan menggunakan *purposive sampling*. Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur dengan menggunakan program SPSS versi 24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap *good governance*, pengendalian intern mempunyai pengaruh signifikan terhadap *good governance*, sistem informasi keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan *good governance* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama melihat pengaruh pengendalian internal dan *good governance*. Perbedaannya peneliti tidak melakukan penelitian terhadap variabel sistem informasi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan. (Pratama & Rahmadoni, 2023)

3. Afifah Muannis Hanifah, Cris Kuntadi, Rachmat Pramukty. (2023) “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Komitmen Manajemen Terhadap *Good Corporate Governance*”

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian. Data dianalisis secara deskriptif dan sintesis untuk mengidentifikasi hubungan dan pengaruh antara variabel yang diteliti. Sistem pengendalian internal, peran audit internal, dan komitmen manajemen secara signifikan mempengaruhi

praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam organisasi. Sistem pengendalian internal memastikan efektivitas operasional dan kepatuhan terhadap hukum, berkontribusi positif terhadap penerapan GCG. Peran audit internal berfungsi sebagai penilai independen yang membantu meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian, juga berpengaruh positif terhadap GCG. Komitmen Manajemen yaitu Komitmen yang tinggi dari manajemen sangat penting untuk penerapan prinsip-prinsip GCG, yang berdampak positif pada kinerja perusahaan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama melihat pengaruh pengendalian internal. Perbedaannya peneliti tidak melakukan penelitian terhadap variabel peran audit internal, *good corporate governance* dan komitmen manajemen. (Hanifah dkk, 2023)

4. Mattoasia, Didiet Pratama Musueb dan Yaman Rauf (2021) “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian uantitatif, dan sumberdatanya menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada responden. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji statistik t-test dan uji koefisien determinasi (*ajusted R-Square*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai determinan sebesar 48,7%. Hasil penelitian ini memberi sumbangsi kepada pemerintah agar dapat menetapkan dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang lebih efektif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama melihat pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

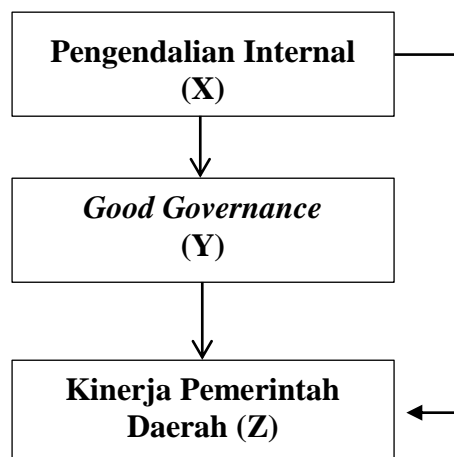
Perbedaannya penelitian terdahulu tidak melakukan penelitian terhadap variabel *good governance*.(Mattoasi dkk, 2021)

5. Hayatun Ruwaidha dan Cris Kundati. (2024) “Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Manajemen dalam Penerapan *Good Corporate Governance*”

Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian terkait topik GCG. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peran audit internal, sistem pengendalian internal, dan komitmen manajemen dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan prinsip-prinsip GCG seperti *fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency* sangat penting untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Setiap prinsip ini saling mendukung dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan stakeholder. Audit internal berfungsi sebagai alat penting dalam meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian menunjukkan bahwa audit internal yang efektif dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan risiko dan efektivitas pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang kokoh berkontribusi positif terhadap implementasi GCG. Penelitian menunjukkan bahwa sistem ini sangat diperlukan untuk mencegah kecurangan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan. Komitmen manajemen yang tinggi berpengaruh positif terhadap implementasi GCG. Manajemen yang menunjukkan integritas dan keterbukaan dapat meningkatkan kepercayaan karyawan dan pemangku kepentingan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama melihat pengaruh pengendalian internal *good corporate governance*. Perbedaannya peneliti tidak melakukan penelitian terhadap variabel peran audit internal, *good corporate governance* dan komitmen manajemen (Ruwaidha & Kundati, 2024)

### C. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini, penulis menyusun suatu kerangka analisis yang akan dijadikan sebagai kerangka pemikiran yang bisa digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**

### D. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah sarana penelitian yang penting dimana hasil dari tinjauan pustaka dijabarkan dengan tepat dugaan atau jawaban sementara tentang hasil penelitian antara dua atau lebih variabel yang diuji dengan harapan atau keterangan empiris yang mudah diperoleh (Fitrah, 2018). Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena belum berdasarkan fakta-fakta empiris. Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pengendalian internal berpengaruh terhadap *good governance*

Pengendalian internal merupakan mekanisme penting yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Apabila pengendalian internal berjalan dengan baik, maka penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga akan meningkat. Penelitian Pratama & Rahmadoni (2023) menemukan bahwa

pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap *good governance* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil serupa juga disampaikan oleh Hanifah dkk. (2023) bahwa sistem pengendalian internal memberikan kontribusi positif terhadap penerapan *good corporate governance*. Hal ini memperkuat dugaan bahwa di Kabupaten Tanah Datar, pengendalian internal juga berpengaruh positif terhadap *good governance*.

Hipotesis Penelitian:

$H_{01}$  = Tidak terdapat pengaruh pengendalian internal yang dilakukan inspektorat Kabupaten Tanah Datar terhadap penerapan *good governance*.

$H_{a1}$  = Terdapat pengaruh pengendalian internal yang dilakukan inspektorat Kabupaten Tanah Datar terhadap penerapan *good governance*.

2. *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

*Good governance* pada dasarnya menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi yang berimplikasi langsung pada kualitas kinerja pemerintah daerah. Semakin baik penerapan *good governance*, maka semakin baik pula kinerja yang ditunjukkan, baik dari aspek pelayanan publik, pengelolaan anggaran, maupun pencapaian pembangunan. Penelitian Rahmani (2023) menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, meskipun pengaruhnya tidak selalu kuat jika tidak didukung faktor lain seperti sistem pengendalian internal. Selain itu, penelitian Ruwaidha & Kundati (2024) menegaskan bahwa tata kelola yang baik mampu memperkuat kepercayaan publik serta mendorong peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

Hipotesis Penelitian:

$H_02$ = Tidak terdapat pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

$H_a2$  = Terdapat pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar

3. Pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengendalian internal merupakan instrumen penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, pemerintah daerah dapat meminimalkan risiko penyimpangan, meningkatkan keandalan laporan keuangan, serta menjamin bahwa penggunaan sumber daya publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi ini secara langsung akan berdampak pada meningkatnya kinerja pemerintah daerah, baik dari aspek pelayanan publik, pengelolaan anggaran, maupun pencapaian tujuan pembangunan. Sejumlah penelitian terdahulu telah mendukung hubungan ini. Penelitian Mattoasi dkk. (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan kontribusi determinasi sebesar 48,7%. Hal senada juga disampaikan oleh Rahmani (2023) yang menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Penelitian lain oleh Hanifah dkk. (2023) juga menambahkan bahwa pengendalian internal tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola yang baik, yang pada akhirnya memperkuat kinerja organisasi.

Hipotesis Penelitian:

$H_03$ = Tidak terdapat pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

$H_a3$ =Terdapat pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

4. Pengendalian internal berpengaruh terhadap *good governance* melalui kinerja pemerintah daerah

Pengendalian internal tidak hanya memengaruhi *good governance* secara langsung, tetapi juga dapat memberikan pengaruh tidak langsung melalui kinerja pemerintah daerah. Artinya, pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah terlebih dahulu, kemudian kinerja yang meningkat tersebut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mattoasi dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Lebih lanjut, Pratama & Rahmadoni (2023) yang menggunakan analisis jalur menemukan adanya pengaruh tidak langsung dari pengendalian internal terhadap variabel lain melalui peran mediasi. Dengan demikian, dapat diduga bahwa di Kabupaten Tanah Datar, pengendalian internal juga memengaruhi *good governance* secara tidak langsung melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Hipotesis Penelitian:

$H_{04}$  = Tidak terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan *good governance* melalui kinerja pemerintah daerah.

$H_{a4}$  = Terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan *good governance* melalui kinerja pemerintah daerah.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel, yaitu pengaruh pengendalian internal terhadap *good governance*, serta pengaruh keduanya terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengukur seberapa besar kontribusi atau pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, yang beralamat di Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Juli 2025, untuk memudahkan kegiatan penelitian sampai pembuatan skripsi, penulis membuat jadwal kegiatan penelitian yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 1  
Jadwal kegiatan Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2025					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Penyusunan Proposal						
2	Bimbingan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Revisi Setelah Seminar						
5	Pengumpulan dan Analisis Data						
6	Membuat Laporan Penelitian						
7	Bimbingan Skripsi						
8	Sidang Munaqasah						

### C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian atau unit analisis yang akan diselidiki atau dipelajari karakteristiknya. Populasi dapat dibedakan atas dua yaitu populasi sampling dan populasi sasaran (Djaali, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, populasi dalam penelitian ini berjumlah 52 orang. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Kualitas sampel dipengaruhi oleh ukuran dan geragamannya, karena faktor-faktor ini menentukan sejauh mana hasil penelitian dapat dianggap representatif. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Kriteria pengambilan sampel adalah semua pegawai yang melakukan pengendalian internal pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, yang berjumlah 45 orang. Adapun sampelnya ialah:

1. Pejabat struktural : 8 orang
2. Pejabat fungsional sebanyak 37 orang antara lain:
  - a. Auditor : 18 orang
  - b. P2UPD :13 orang
  - c. Auditor kepegawaian :1 orang
  - d. Fungsional umum :5 orang

### D. Pengembangan Instrumen

Setelah ditetapkan item-item dari variabel yang ada, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan pengukuran atas variabel-variabel tersebut. Adapun yang menjadi instrument dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner, yakni sejumlah daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendasar dari laporan tentang diri responden. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif guna menguji hipotesis dan model kajian. Sedangkan penyusunan skala

pengukuran digunakan metode *Likerts Summated Ratings* (LSR), dengan alternatif pilihan 1 sampai dengan 5 jawaban pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**  
**Skor Kuesioner**

No	Sikap Responden	Skor
1	Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah	1
2	Tidak Setuju/Jarang	2
3	Ragu-Ragu/Kadang-Kadang	3
4	Setuju/Sering	4
5	Sangat Setuju/Selalu	5

Sumber: Sugiyono, 2018

Dalam sebuah penelitian, penting untuk menyusun kuesioner yang memiliki kisi-kisi yang sesuai dengan indikator variabel yang diteliti. Kisi-kisi kuesioner berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan dapat mencakup semua aspek yang relevan dari variabel penelitian. Dengan demikian, penyusunan kisi-kisi kuesioner yang sistematis dan terstruktur akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif, sehingga hasil penelitian dapat lebih valid dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disusun kisi-kisi kuesioner yang mencerminkan indikator-indikator variabel yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga setiap elemen yang ingin diukur dapat terwakili dengan baik dalam kuesioner yang akan disebarakan kepada responden. Kisi-kisi kuesioner dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Kisi-Kisi kuesioner**

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	Pengendalian Internal (X) (Nurriani, 2024)	a. Lingkungan Pengendalian	1) Inspektorat Daerah secara aktif memantau kepatuhan terhadap kode etik dan nilai integritas di lingkungan pemerintah daerah

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
			<p>2) Struktur organisasi dan uraian tugas di lingkungan kerja telah mendukung penerapan pengendalian internal</p> <p>3) Pimpinan OPD menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal secara Konsisten</p>
		b. Penilaian Risiko	<p>1) Inspektorat Daerah terlibat dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perangkat daerah</p> <p>2) Perangkat daerah telah menyusun dokumen penilaian risiko dan memperbaruinya secara berkala dengan pengawasan Inspektorat</p> <p>3) Inspektorat mendorong penggunaan hasil penilaian risiko dalam perencanaan dan pengambilan keputusan</p>
		c. Aktivitas Pengendalian	<p>1) Inspektorat memantau pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengendalikan risiko</p>

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
			<p>yang telah diidentifikasi</p> <p>2) Inspektorat menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>3) Inspektorat memastikan adanya pemisahan fungsi yang memadai dalam proses kegiatan pemerintahan</p>
		d. Informasi dan Komunikasi	<p>1) Inspektorat memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengendalian internal tersedia secara akurat dan tepat waktu</p> <p>2) Ada saluran komunikasi dua arah yang efektif antara Inspektorat dan OPD terkait pengendalian internal</p> <p>3) Hasil pengawasan dan rekomendasi dari Inspektorat dikomunikasikan secara terbuka kepada pihak terkait</p>
		e. Pemantauan	<p>1) Inspektorat melakukan evaluasi berkala atas efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal di seluruh OPD.</p> <p>2) Ada sistem pelaporan hasil</p>

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
			<p>pemantauan yang memungkinkan tindak lanjut yang cepat dan akurat</p> <p>3) Inspektorat menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan internal maupun eksternal secara konsisten</p>
2	<p><i>Good Governance</i> (Y) (Nurriani, 2024)</p>	a. Partisipasi	<p>1) Inspektorat melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan program pengawasan.</p> <p>2) Inspektorat menerima dan menindaklanjuti masukan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pengawasan.</p> <p>3) Inspektorat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan berbasis partisipatif.</p>
		b. Penegakan Hukum	<p>1) Seluruh kegiatan Inspektorat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Inspektorat memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam proses pengawasan.</p> <p>3) Inspektorat menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap rekomendasi hasil</p>

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
		c. Transparansi	<p data-bbox="970 344 1139 376">pengawasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="927 405 1362 600">1) Hasil pengawasan Inspektorat disampaikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan.</li> <li data-bbox="927 622 1362 817">2) Inspektorat mempublikasikan laporan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li data-bbox="927 840 1362 1034">3) Informasi terkait proses dan hasil pengawasan mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan.</li> </ol>
		d. Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="927 1061 1362 1256">1) Inspektorat merespons laporan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.</li> <li data-bbox="927 1279 1362 1429">2) Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam waktu yang sesuai standar.</li> <li data-bbox="927 1451 1362 1646">3) Inspektorat tanggap terhadap perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan.</li> </ol>
		e. Berorientasi Konsensus	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="927 1666 1362 1861">1) Inspektorat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dalam pengambilan keputusan.</li> <li data-bbox="927 1883 1362 1980">2) Rekomendasi Inspektorat mempertimbangkan berbagai</li> </ol>

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
			<p>sudut pandang yang relevan.</p> <p>3) Inspektorat berperan dalam menciptakan kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah pengawasan.</p>
		f. Keadilan dan Inklusivitas	<p>1) Inspektorat mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok masyarakat dalam kegiatan pengawasan.</p> <p>2) Proses pengawasan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik.</p> <p>3) Inspektorat memberikan ruang bagi kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasinya.</p>
		g. Efektivitas dan Efisiensi	<p>1) Inspektorat menggunakan sumber daya secara efisien dalam pelaksanaan pengawasan.</p> <p>2) Kegiatan pengawasan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan aplikatif.</p> <p>3) Inspektorat menerapkan sistem kerja berbasis hasil (<i>output</i> dan <i>outcome</i>).</p>
		h. Akuntabilitas	<p>1) Inspektorat mempertanggungjawabkan hasil pengawasan kepada kepala daerah secara</p>

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
			<p>berkala.</p> <p>2) Setiap rekomendasi pengawasan dilengkapi dengan tindak lanjut yang terukur.</p> <p>3) Inspektorat terbuka terhadap evaluasi dari pihak internal dan eksternal.</p>
3	Kinerja Pemerintah Daerah (Z) (Tambunan, 2024)	<i>a. Input</i>	<p>1) Inspektorat memiliki anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan internal secara optimal.</p> <p>2) Jumlah dan kompetensi auditor/pengawas di Inspektorat Daerah sudah sesuai dengan kompleksitas tugas pengawasan.</p> <p>3) Sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat IT dan kendaraan dinas, tersedia dan digunakan secara efisien oleh Inspektorat.</p>
		<i>b. Output</i>	<p>1) Inspektorat secara rutin menghasilkan laporan hasil pengawasan yang tepat waktu dan sesuai standar pemeriksaan.</p> <p>2) Rekomendasi pengawasan</p>

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
			<p>yang diberikan Inspektorat dapat langsung diterapkan oleh perangkat daerah terkait.</p> <p>3) Kegiatan audit, reviu, dan evaluasi oleh Inspektorat menghasilkan dokumen dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.</p>
		<i>c. Outcome</i>	<p>1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan.</p> <p>2) Tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat menunjukkan perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan dan kinerja OPD.</p> <p>3) Hasil pengawasan Inspektorat digunakan oleh kepala daerah untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan pemerintahan.</p>
		d. Dampak	<p>1) Pengawasan oleh Inspektorat berdampak pada meningkatnya akuntabilitas</p>

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
			<p>dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah.</p> <p>2) Pelaksanaan program/ kegiatan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien setelah adanya pengawasan dari Inspektorat</p> <p>3) Peran Inspektorat membantu menurunkan potensi penyimpangan atau korupsi di perangkat daerah secara signifikan.</p>

## E. Sumber Data

Sebagai alat bantu untuk mencari hasil dari sebuah riset, maka diperlukan data primer dan data ini sering kali disandingkan dengan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer ialah sebuah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan oleh peneliti. Dengan kata lain peneliti sendiri yang mengumpulkan data primer tersebut. Peneliti bisa mengumpulkan data melalui wawancara, kuesioner, eksperimen, observasi langsung, survey, dll. Tujuan dikumpulkannya data ini untuk tujuan tertentu. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, data mungkin menjadi tidak penting untuk tujuan lain.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Data ini sudah tersedia dalam berbagai bentuk dan sumber, seperti *database*, arsip, publikasi, atau jenis penyimpanan

data lainnya. Data sekunder dapat berupa catatan internal, dokumentasi publik, publikasi ilmiah, media masa, basis data komersial, dan sumber online. Meskipun data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik penelitiannya, data ini dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga dan efisien. (Handayani, 2023)

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden dengan cara sebagai berikut:

### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi berbagai jenis materi tertulis atau visual yang relevan dengan masalah penelitian. Metode ini berfokus pada data yang sudah ada dan tersedia dalam bentuk dokumen, arsip, literatur, atau karangan ilmiah, yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan topik yang sedang diteliti. Berbeda dengan observasi atau wawancara yang mengumpulkan data langsung dari subjek penelitian, dokumentasi memanfaatkan jejak-jejak informasi yang telah terekam sebelumnya. (Djaali, 2021)

### **2. Kuesioner**

Kuesioner adalah salah satu metode pengumpulan data yang paling umum dan populer dalam penelitian, terutama dalam penelitian kuantitatif. Metode ini melibatkan pemberian seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, data, atau opini yang relevan dengan tujuan penelitian. Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik, memungkinkan perbandingan antar responden atau kelompok. Responden biasanya diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tertulis, meskipun dalam beberapa kasus, peneliti atau asisten peneliti dapat membantu responden dalam mengisi

jawaban, terutama jika ada kendala literasi atau pemahaman. (Nasution dkk, 2024)

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian adalah proses mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Analisis data dalam penelitian diolah dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS (*Statistik Product and Service Solution*) versi 27, yaitu program komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan data statistik. Metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas adalah salah satu tahapan krusial dalam pengembangan dan penggunaan instrumen penelitian, khususnya kuesioner, dalam penelitian kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen (kuesioner atau skala pengukuran) benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan atau item-item di dalamnya secara akurat dan tepat mampu mengungkap atau merepresentasikan konsep, variabel, atau atribut yang ingin diukur oleh peneliti. Jika suatu instrumen tidak valid, maka data yang dikumpulkan tidak akan mencerminkan fenomena yang sebenarnya, sehingga kesimpulan yang ditarik dari penelitian tersebut menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria pengujian uji validitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka instrument penelitian dikatakan valid
- 2) Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka instrument penelitian dikatakan invalid (Darma, 2021).

## b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah tahapan penting dalam evaluasi kualitas instrumen penelitian, khususnya kuesioner atau skala pengukuran. Tujuan utama uji reliabilitas adalah untuk mengecek apakah alat ukur (kuesioner) yang dipakai bisa dipercaya dan konsisten atau stabil jika digunakan dalam kondisi yang sama secara berulang-ulang. Dengan kata lain, reliabilitas mengacu pada konsistensi pengukuran. Jika suatu instrumen reliabel, maka pengukuran yang dilakukan berulang kali pada objek yang sama akan menghasilkan hasil yang serupa atau konsisten, asalkan tidak ada perubahan pada objek yang diukur. Uji reabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's alpha* dengan tingkat/ taraf signifikan yang digunakan. *Cronbach's Alpha* adalah koefisien yang mengukur seberapa baik item-item dalam suatu skala mengukur konstruk yang sama. Kriteria pengujian uji reabilitas sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Cronbach's alpha*  $>$  tingkat signifikan, maka instrument dikatakan reliabel.
- 2) Jika nilai *Cronbach's alpha*  $<$  tingkat signifikan, maka instrument dikatakan tidak reliabel. (Darma, 2021)

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model dari regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode dari uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada uji *Spearman Correlation*. Uji ini nantinya akan mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih  $> 0,05$  (Priyatno, 2024)

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati antar variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua independen variabel di dalam fungsi linear dan hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen dan dependen variabel. Untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu gejala multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila nilai VIF  $< 10$  maka dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas. (Priyatno, 2024)

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah varians residu dari satu pengamatan ke pengamatan lain sama dalam regresi. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah varians dari error term (residu) dari satu pengamatan ke pengamatan lain adalah konstan (homoskedastisitas) atau tidak konstan (heteroskedastisitas). Cara mendeteksi uji ini adalah dengan melihat pola sebaran *plot scatter* pada grafik. Heteroskedastisitas terjadi jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada berbentuk pola teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit). Jika tidak ada pola, seperti titik-titik yang tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, heteroskedastisitas tidak terjadi. (Wibowo, 2022)

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Teknik analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. Analisis jalur digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah dimana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Regresi dikenakan pada masing-masing

variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respons) sedang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksi dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga perhitungan keselarasan statistik.

Koefisien Jalur (*Path Coefficient* /  $\beta$ ) Menunjukkan seberapa besar pengaruh langsung suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai bisa positif atau negatif, tergantung arah pengaruhnya. Uji Signifikansi (t-test / p-value) untuk melihat apakah pengaruh variabel tersebut signifikan atau tidak. Biasanya, jika  $p < 0,05$ , maka pengaruhnya dianggap signifikan. Pemilihan analisis jalur untuk menguji hipotesis didasarkan pada kemampuannya untuk memodelkan hubungan kausal yang kompleks antara variabel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang interaksi antar variabel. Selain itu, analisis jalur mendukung pengujian model teoritis, sehingga membantu dalam memperkuat validitas kesimpulan yang diambil dari penelitian. (Ghodang, 2020)

#### b. *Sobel Test*

Uji Sobel atau *sobel test* dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen atau eksogen ke variabel dependen atau endogen melalui variabel perantara atau intervening. Sobel test dapat diartikan juga sebagai uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Adapun dalam pengujian *Sobel test* menggunakan uji z dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}}$$

Dimana:

a = Koefisien regresi variabel independen terhadap variabel mediasi

b = Koefisien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen

SE = *Standard error of estimation* dari pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi

SE = *Standard error of estimation* dari pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen

Adapun pemaknaan hasil sobel test adalah jika nilai z yang diperoleh  $> 1.96$  dengan tingkat signifikan 5% maka membuktikan variabel intervening mampu memediasi hubungan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. (Supriadi, 2022)

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik analisis regresi, hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin  $R^2$  mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan perubahan nilai variabel independen terhadap variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan koefisien determinasi R Square, karena penggunaan koefisien R *Square* mempunyai kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independent, maka nilai  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui intensitas hubungan variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y), dilihat dari nilai koefisien korelasi (r) adapun rentang nilai intensitas tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3. 4**  
**Tabel Koefisien Determinasi**

Nilai	Keterangan
0.00 - 0.199	Sangat Rendah
0.20 - 0.399	Rendah
0.40 - 0.599	Sedang
0.60 - 0.799	Kuat
0.80 - 1.000	Sangat Kuat

*Sumber: Darma, 2021.*

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Inspektorat Kabupaten Tanah Datar**

##### **1. Sejarah Terbentuknya Inspektorat Kabupaten Tanah Datar**

Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku Inspektorat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang berperan memberikan keyakinan yang memadai atas Ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. pemeriksaan, reviu, evaluasi, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas.
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

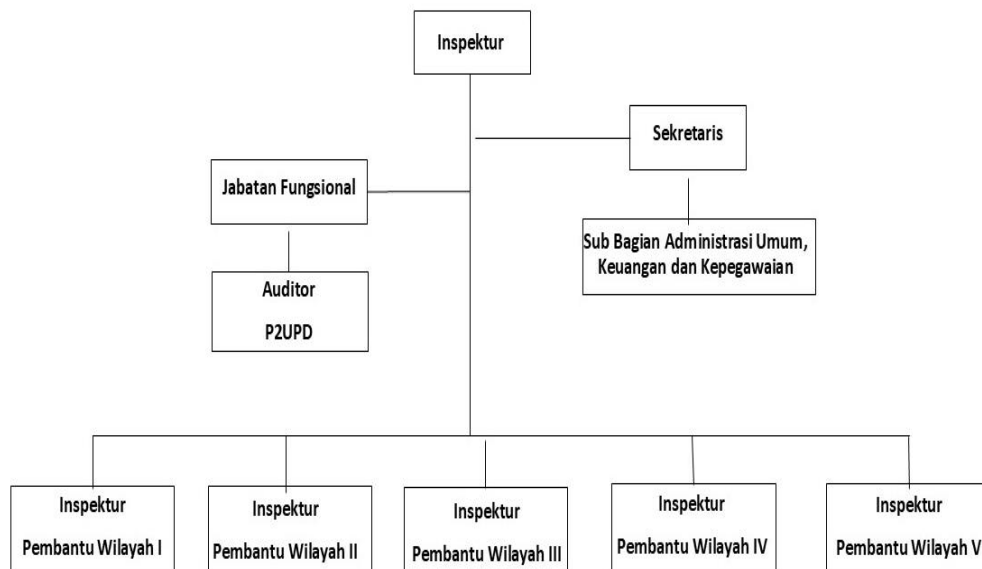
##### **2. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 menetapkan bahwa Visi pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan adalah “ Terwujudnya

Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Sarak Basandi Kitabullah.” Sementara Misi pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan adalah:

- a. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
- b. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan Perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industry dan UMKM.
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- d. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

### 3. Srtuktur Inspektorat Kabupaten Tanah Datar



**Gambar 4. 1**

#### **Struktur Inspektorat Kabupaten Tanah Datar**

Inspektorat dipimpin Inspektur yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Inspektur membawahi Sekretariat, Inspektur

Pembantu Wilayah dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai bidang tugas yang telah ditetapkan.

Uraian tugas masing-masing dapat dilihat sebagai berikut:

a. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan fungsi
- 2) menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- 3) menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
- 4) menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyel program, kesekretariatan, koordinasi dan pelaksanaan pemerintahan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- 5) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 6) menyelenggarakan koordinasi, memberikan pelayanan dan informasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- 7) melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Inspektorat, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum dan organisasi. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas;
- 2) pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategik;
- 3) pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi;
- 4) pengoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD.

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas urusan ketatausahaan, Pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian serta menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 2) membuat rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan, penggunaan dan administrasi peralatan, perlengkapan dan aset;
- 4) melaksanakan administrasi persuratan dan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Inspektorat; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran; Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan X Koto; Kecamatan Batipuh; Kecamatan Pariangan; Desa (Nagari) serta urusan di wilayah kerja Kecamatan X Koto, Batipuh dan Pariangan. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan rancangan program kerja pengawasan sesuai dengan pembagian wilayah.
- 2) penyusunan rancangan surat Tim Pra Penugasan untuk disampaikan kepada Bagian Sekretariat;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan wilayah kerja;
- 4) penyimpanan, pengagendaan, dan penelaahan laporan hasil pemeriksaan sesuai pembagian wilayah;
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pangan dan Perikanan; Dinas Pertanian; Kecamatan Tanjung Baru; Kecamatan Salimpaung; Kecamatan Sungai Tarab; Kecamatan Sungayang, Desa (Nagari) serta urusan di wilayah kerja Kecamatan Tanjung Baru, Salimpaung, Sungai Tarab dan Sungayang. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan rancangan program kerja pengawasan sesuai dengan pembagian wilayah.
- 2) penyusunan rancangan surat Tim Pra Penugasan untuk disampaikan kepada Bagian Sekretariat.

- 3) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan wilayah kerja.
- 4) penyimpanan, mengagendakan, dan melakukan telaahaan terhadap laporan hasil pemeriksaan sesuai pembagian wilayah kerja.
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Badan Keuangan Daerah; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Badan Usaha Milik Daerah; Kecamatan Tanjung Emas; Kecamatan Padang Ganting; Kecamatan Lintau Buo; Kecamatan Lintau Buo Utara; Desa (Nagari) serta urusan di wilayah kerja Kecamatan Tanjung Emas, Padang Ganting, Lintau Buo dan Lintau Buo Utara. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan rancangan program kerja pengawasan sesuai dengan pembagian wilayah;
- 2) penyusunan rancangan surat Tim Pra Penugasan untuk disampaikan kepada Bagian Sekretariat untuk diterbitkan surat penugasan Tim;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan wilayah kerja;
- 4) penghimpunan data/dokumen serta kusioner yang dibutuhkan untuk pemeriksaan; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD Prof. DR. M Ali Hanafiah SM Batusangkar; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pemberdayaan, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kecamatan Lima Kaum; Kecamatan Rambatan; Kecamatan Batipuh Selatan; Desa (Nagari) serta urusan di wilayah kerja Kecamatan Lima Kaum, Rambatan dan Batipuh Selatan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan rancangan program kerja pengawasan sesuai dengan pembagian wilayah;
- 2) penyusunan rancangan surat Tim Pra Penugasan untuk disampaikan kepada Bagian Sekretariat untuk diterbitkan surat penugasan Tim;
- 3) penghimpunan data/dokumen serta kusioner yang dibutuhkan untuk pemeriksaan; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Inspektur Pembantu Wilayah V

Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas inspektur dalam melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pengawasan yang tidak termasuk lingkup tugas dan fungsi inspektur pembantu I, inspektur pembantu II, inspektur pembantu II, inspektur pembantu IV. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan dan teknis pengawasan dan fasilitasi bidang khusus tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur.
- 2) Pengoordinasian dalam penyusunan program kerja pengawasan tahunan.
- 3) Pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan audit investigasi.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas adalah langkah krusial dalam pengembangan dan evaluasi instrumen penelitian, yang berfungsi untuk menentukan sejauh mana suatu alat ukur, seperti kuesioner, benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah kuesioner dikatakan valid apabila setiap pertanyaan atau item di dalamnya secara akurat dan relevan merepresentasikan konsep atau variabel yang ingin diungkap. Ini berarti bahwa item-item kuesioner tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga secara tepat menangkap esensi dari atribut, perilaku, atau karakteristik yang menjadi fokus penelitian.

**Tabel 4. 1**  
**Uji Validitas variabel Pengendalian Internal**

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	0.808	0.361	Valid
X2	0.752	0.361	Valid
X3	0.752	0.361	Valid
X4	0.903	0.361	Valid
X5	0.720	0.361	Valid

X6	0.756	0.361	Valid
X7	0.729	0.361	Valid
X8	0.740	0.361	Valid
X9	0.603	0.361	Valid
X10	0.703	0.361	Valid
X11	0.741	0.361	Valid
X12	0.682	0.361	Valid
X13	0.833	0.361	Valid
X14	0.777	0.361	Valid
X15	0.788	0.361	Valid

Hasil pengujian validitas untuk variabel Pengendalian Internal menunjukkan bahwa 15 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid karena nilai signifikasi  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga seluruh item pernyataan dalam variabel Pengendalian Internal dapat dinyatakan tepat mengukur variabel tersebut.

**Tabel 4. 2**  
**Uji Validitas variabel *Good Governance***

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0.890	0.361	Valid
Y2	0.578	0.361	Valid
Y3	0.856	0.361	Valid
Y4	0.865	0.361	Valid
Y5	0.463	0.361	Valid
Y6	0.826	0.361	Valid
Y7	0.478	0.361	Valid
Y8	0.455	0.361	Valid
Y9	0.817	0.361	Valid
Y10	0.805	0.361	Valid

Y11	0.766	0.361	Valid
Y12	0.836	0.361	Valid
Y13	0.815	0.361	Valid
Y14	0.648	0.361	Valid
Y15	0.714	0.361	Valid
Y16	0.658	0.361	Valid
Y17	0.703	0.361	Valid
Y18	0.724	0.361	Valid
Y19	0.698	0.361	Valid
Y20	0.761	0.361	Valid
Y21	0.805	0.361	Valid
Y22	0.766	0.361	Valid
Y23	0.836	0.361	Valid
Y24	0.815	0.361	Valid

Hasil pengujian validitas untuk variabel *good governance* menunjukkan bahwa 24 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid karena nilai signifikasi  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga seluruh item pernyataan dalam variabel Pengendalian Internal dapat dinyatakan tepat mengukur variabel tersebut.

**Tabel 4. 3**  
**Uji Validitas variabel Kinerja Pemerintah Daerah**

Item	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
Z1	0.679	0.361	Valid
Z2	0.747	0.361	Valid
Z3	0.845	0.361	Valid
Z4	0.764	0.361	Valid
Z5	0.822	0.361	Valid
Z6	0.738	0.361	Valid
Z7	0.541	0.361	Valid

Z8	0.472	0.361	Valid
Z9	0.746	0.361	Valid
Z10	0.835	0.361	Valid
Z11	0.672	0.361	Valid
Z12	0.850	0.361	Valid

Hasil pengujian validitas untuk variabel Kinerja Pemerintah daerah menunjukkan bahwa 12 item pernyataan seluruhnya dinyatakan valid karena nilai signifikansi  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sehingga seluruh item pernyataan dalam variabel Kinerja Pemerintah Daerah dapat dinyatakan tepat mengukur variabel tersebut.

#### b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan prosedur statistik esensial yang dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi dan stabilitas suatu alat ukur, dalam konteks ini adalah kuesioner. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dapat memberikan hasil yang konsisten apabila pengukuran dilakukan secara berulang-ulang pada subjek yang sama atau dalam kondisi yang serupa. Dengan kata lain, reliabilitas mengukur sejauh mana suatu kuesioner bebas dari kesalahan pengukuran acak, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan mencerminkan karakteristik yang sebenarnya dari fenomena yang sedang diteliti.

**Tabel 4. 4**  
**Uji Realibilitas variabel Pengendalian Internal**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.944	15

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
V1	60.67	46.230	.775	.938
V2	60.87	46.326	.708	.940
V3	61.07	45.582	.702	.940
V4	60.93	45.720	.887	.936
V5	60.63	47.620	.680	.941
V6	61.03	46.861	.716	.940
V7	61.07	46.754	.683	.940
V8	60.87	45.982	.690	.940
V9	60.70	48.079	.544	.944
V10	60.80	46.717	.651	.941
V11	60.90	46.507	.696	.940
V12	60.87	46.189	.620	.943
V13	61.00	46.000	.804	.937
V14	60.87	47.223	.744	.939
V15	61.00	46.414	.752	.939

**Tabel 4. 5**  
**Uji Realibilitas variabel *Good Governance***

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.949	24

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
V1	100.6000	106.455	.824	.956
V2	100.9000	108.162	.518	.959
V3	100.5667	106.530	.809	.956
V4	100.6667	106.713	.826	.956
V5	100.9667	108.102	.425	.961
V6	100.5333	106.395	.816	.956
V7	100.9333	107.995	.446	.960

V8	100.7333	108.133	.437	.961
V9	100.5333	106.189	.835	.956
V10	100.6333	106.930	.792	.956
V11	100.5000	106.741	.784	.956
V12	100.5333	106.120	.841	.955
V13	100.6333	107.137	.773	.956
V14	100.8667	107.913	.615	.958
V15	100.7667	105.564	.685	.957
V16	100.8667	107.499	.593	.958
V17	100.3000	108.148	.711	.957
V18	100.3333	107.540	.750	.956
V19	100.3000	108.079	.717	.957
V20	100.5333	105.775	.721	.957
V021	100.6333	106.930	.792	.956
V22	100.5000	106.741	.784	.956
V23	100.5333	106.120	.841	.955
V24	100.6333	107.137	.773	.956

**Tabel 4. 6**  
**Uji Realibilitas variabel Kinerja Pemerintah Daerah**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.901	12

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
V1	44.60	24.524	.616	.893
V2	44.67	24.230	.696	.890
V3	44.73	23.375	.809	.884
V4	44.57	23.978	.714	.889
V5	44.77	23.633	.782	.885
V6	44.53	24.120	.682	.890
V7	45.73	24.202	.416	.907
V8	45.60	25.007	.347	.909
V9	45.37	22.516	.665	.891

V10	44.93	22.616	.788	.883
V11	44.73	24.823	.613	.893
V12	44.77	24.668	.582	.894

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan terhadap instrumen penelitian, yaitu kuesioner untuk variabel Pengendalian Internal, *Good Governance*, dan Kinerja Pemerintah Daerah, diperoleh nilai koefisien *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel. Seluruh nilai *Cronbach's Alpha* tersebut menunjukkan angka di atas 0.7. Nilai *Cronbach's Alpha* yang melebihi 0.7 secara umum diterima sebagai indikator reliabilitas yang baik. Ini berarti bahwa instrumen pengukuran yang digunakan untuk setiap variabel (Pengendalian Internal, *Good Governance*, dan Kinerja Pemerintah Daerah) konsisten dan stabil dalam mengukur konstruk yang dimaksud

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah sekumpulan data mengikuti distribusi normal, yaitu bentuk distribusi data yang simetris dengan mayoritas nilai berkumpul di sekitar rata-rata dan semakin sedikit nilai di bagian ekstrem (baik rendah maupun tinggi). Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih  $> 0,05$ . Pentingnya uji normalitas terletak pada persyaratan banyak metode statistik parametrik yang mengasumsikan bahwa data atau residual terdistribusi secara normal untuk menghasilkan estimasi parameter yang tidak bias dan efisien, serta untuk validitas uji hipotesis. Dalam konteks analisis regresi, asumsi normalitas residual berarti bahwa perbedaan antara nilai observasi dan nilai prediksi model (residual) harus terdistribusi secara normal.

**Tabel 4. 7**  
**Uji Normalitas**

Correlations			x	Y	z
Spearman's rho	x	Correlation Coefficient	1.000	.807**	.788**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000
		N	45	45	45
	y	Correlation Coefficient	.807**	1.000	.744**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000
		N	45	45	45
	z	Correlation Coefficient	.788**	.744**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.
		N	45	45	45
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap tabel uji normalitas, terlihat jelas bahwa penggunaan Uji *Spearman Correlation* menghasilkan nilai signifikansi yang melebihi ambang batas 0,05. Temuan ini secara statistik mengindikasikan bahwa sebaran data residual dalam model regresi yang diuji mengikuti pola distribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas ini, validitas inferensi statistik yang ditarik dari model regresi menjadi lebih kuat, memastikan bahwa estimasi parameter dan pengujian hipotesis yang dilakukan dapat diandalkan dan representatif.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang sangat penting dalam analisis regresi berganda, yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan hubungan linear yang sangat kuat atau sempurna di antara dua atau lebih variabel independen (variabel bebas) dalam suatu model regresi. Fenomena multikolinearitas terjadi ketika variabel-variabel prediktor saling berkorelasi secara signifikan satu sama lain, bukan hanya dengan variabel dependen.

**Tabel 4. 8**  
**Uji Multikolinearitas**

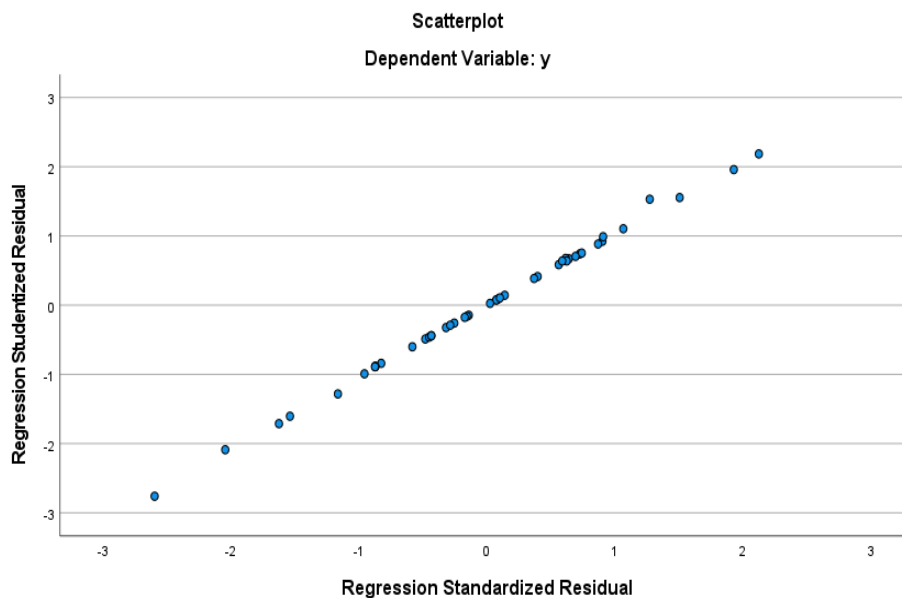
Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	x	.397	2.519
	z	.397	2.519

a. Dependent Variable: y

Hasil uji multikolinearitas yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk seluruh variabel independen dalam penelitian ini berada di bawah ambang batas 10. Secara spesifik, temuan ini merupakan indikator kuat yang menegaskan ketiadaan gejala multikolinearitas serius antar variabel bebas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi linear yang tinggi di antara variabel-variabel prediktor, sehingga model regresi ini memenuhi asumsi penting untuk analisis yang valid

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah salah satu uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual (*error term*) di antara setiap pengamatan dalam model. Asumsi dasar dalam regresi linear klasik adalah homoskedastisitas, yaitu varians residual harus konstan atau sama untuk semua tingkat variabel independen. Heteroskedastisitas, sebaliknya, terjadi ketika varians residual tidak konstan, melainkan bervariasi seiring dengan perubahan nilai variabel independen. Cara mendeteksi uji ini adalah dengan melihat pola sebaran *plot scatter* pada grafik



**Gambar 4. 2**  
**Grafik *Plot Scatter***

Cara mendeteksi uji ini adalah dengan melihat pola sebaran *plot scatter* pada grafik. Heteroskedastisitas terjadi jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada berbentuk pola teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit). Jika tidak ada pola, seperti titik-titik yang tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, heteroskedastisitas tidak terjadi. Dari grafik *scatterplot* tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada suatu tempat dan tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengidentifikasi bahwa pada model regresi tidak adanya atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur adalah sebuah teknik statistik multivariat yang kuat, merupakan perluasan dari analisis regresi berganda, yang dirancang khusus untuk menguji dan menganalisis hubungan sebab-akibat (kausal) yang kompleks di antara beberapa variabel. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memodelkan dan mengestimasi efek langsung dan tidak langsung dari satu atau lebih variabel independen

terhadap satu atau lebih variabel dependen, seringkali melibatkan variabel mediasi (*intervening variables*) yang berperan dalam transmisi efek.

$$1) Z = a + by + e$$

**Tabel 4. 9**  
**Uji variabel Y dan Z**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.641	5.019		1.722	.092
	Y	.390	.049	.771	7.936	.000

a. Dependent Variable: z

Tabel 4.9 menyajikan hasil pengujian pengaruh langsung variabel *Good Governance* (Y) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Z), menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0.390 dan nilai signifikansi 0.000. Hasil ini secara statistik membuktikan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, mengindikasikan bahwa semakin baik tata kelola pemerintahan, semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah.

$$2) Z = a + bX + e$$

**Tabel 4. 10**  
**Uji variabel X dan Z**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.779	4.420		2.891	.006
	X	.556	.069	.777	8.081	.000

a. Dependent Variable: z

Hasil dari tabel 4.10 menguraikan pengaruh langsung variabel Pengendalian Internal (X) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Z), dengan koefisien regresi positif sebesar 0.556 dan nilai

signifikansi 0.000. Temuan ini secara jelas menunjukkan bahwa Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sistem pengendalian internal yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

$$3) Y = a + b_1X + b_2Z$$

**Tabel 4. 11**  
**Uji variabel X, Y dan Z**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.714	8.033		2.330	.025
	X	.816	.182	.576	4.493	.000
	Z	.640	.254	.324	2.524	.015

a. Dependent Variable: y

Tabel ini menampilkan hasil pengujian pengaruh langsung variabel Pengendalian Internal (X) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Z) terhadap *Good Governance* (Y). Ditemukan bahwa Pengendalian Internal (X) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap *Good Governance* (Y) dengan koefisien 0.816 (Sig. 0.000), dan Kinerja Pemerintah Daerah (Z) juga memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap *Good Governance* (Y) dengan koefisien 0.640 (Sig. 0.015), yang secara kolektif mengindikasikan bahwa baik pengendalian internal maupun kinerja pemerintah daerah berperan penting dalam membentuk kualitas tata kelola yang baik.

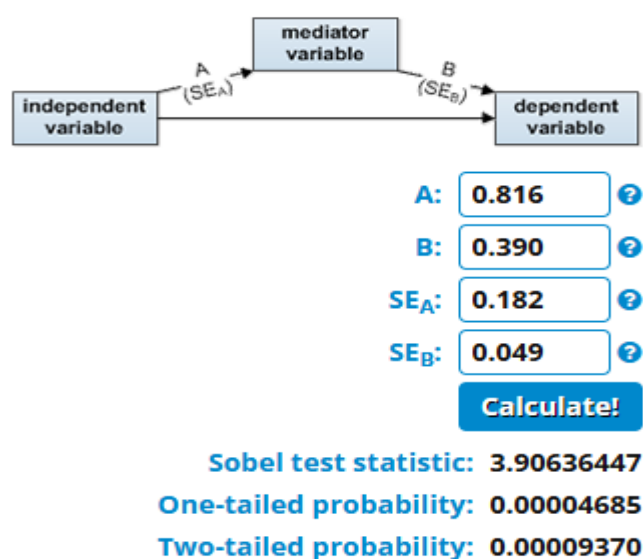
**Tabel 4. 12**  
**Hasil Pengujian Pengaruh Langsung**

Pengaruh Langsung	Koefesien Jalur	P-Value	Kesimpulan
Pengendalian Internal -> Kinerja Pemerintah Daerah	0, 556	0,000	Signifikan

<i>Good Governance</i> -> Kinerja Pemerintah Daerah	0,390	0,000	Signifikan
Pengendalian Internal -> <i>Good Governance</i>	0,816	0,000	Signifikan
Kinerja Pemerintah Daerah -> <i>Good Governance</i>	0,640	0,015	Signifikan

### b. Sobel Test

*Sobel Test* adalah sebuah uji statistik spesifik yang dirancang untuk mengevaluasi signifikansi statistik dari efek tidak langsung (*indirect effect*) atau efek mediasi dalam suatu model hubungan antar variabel. Dalam konteks analisis jalur atau model mediasi, *Sobel Test* digunakan untuk menentukan apakah pengaruh suatu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang melewati atau dimediasi oleh variabel perantara (Z) adalah signifikan secara statistik



**Gambar 4.3**  
Sobel Test

**Tabel 4. 13**  
**Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung**

Pengaruh Tidak Langsung	Koefisien Jalur	P-Value	Kesimpulan
Pengendalian Internal -> Kinerja Pemerintah Daerah-> <i>Good Governance</i>	0, 556x 0, 640 = 0, 355	0, 0000468	Signifikan

#### 4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi, yang umumnya dikenal sebagai  $R^2$  (*R-squared*), adalah salah satu ukuran statistik kunci dalam analisis regresi yang berfungsi untuk mengukur proporsi atau persentase total variabilitas variabel dependen (variabel terikat) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas satu atau lebih variabel independen (variabel bebas) dalam model regresi. Dengan kata lain,  $R^2$  memberikan indikasi seberapa baik model regresi yang telah dibangun dapat memprediksi atau menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 hingga 1 (atau 0% hingga 100%).

**Tabel 4. 14**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 <sup>a</sup>	.684	.677	5.922
a. Predictors: (Constant), x				

Berdasarkan tabel hasil analisis, nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh adalah 0.684. Angka ini memiliki implikasi penting dalam memahami kekuatan model penelitian ini, karena mengindikasikan bahwa variabel independen, yaitu Pengendalian Internal (X), memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabilitas atau perubahan yang terjadi pada variabel dependen, yaitu *Good Governance* (Y), sebesar 68.4%. Persentase yang kuat ini menunjukkan bahwa Pengendalian Internal merupakan faktor yang sangat dominan dan memiliki kontribusi

substansial dalam membentuk atau memengaruhi tingkat *Good Governance* di Inspektorat Kabupaten Tanah Datar.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa masih terdapat sisa sebesar 31.6% dari total variabilitas *Good Governance* yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel Pengendalian Internal dalam model penelitian ini. Proporsi yang tidak dijelaskan ini secara jelas mengisyaratkan adanya pengaruh dari variabel-variabel lain yang tidak termasuk atau tidak diuji dalam kerangka penelitian ini. Faktor-faktor eksternal atau variabel-variabel lain yang belum teridentifikasi ini mungkin turut berperan signifikan dalam memengaruhi kualitas *Good Governance*.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh pengendalian internal yang dilakukan inspektorat Kabupaten Tanah Datar terhadap penerapan *good governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *good governance* di Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Nilai koefisien sebesar 0.816 dengan tingkat signifikansi 0.000 ( $p < 0.05$ ) secara kuat mendukung hipotesis ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Inspektorat, semakin tinggi pula kualitas penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan daerah.

Interpretasi dari hasil ini adalah bahwa upaya Inspektorat dalam menegakkan etika dan integritas, membangun struktur organisasi yang kondusif, mendorong komitmen pimpinan OPD terhadap pengendalian internal, serta melakukan penilaian risiko yang komprehensif, secara langsung berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan prinsip *good governance* lainnya. Ketika Inspektorat secara aktif memantau kepatuhan, mengidentifikasi dan menganalisis risiko, serta memastikan adanya pemisahan fungsi yang memadai, hal ini menciptakan

lingkungan yang meminimalkan peluang penyimpangan dan mendorong praktik tata kelola yang baik. Informasi yang akurat dan komunikasi yang efektif, sebagaimana diindikasikan oleh komponen pengendalian internal, juga berperan krusial dalam memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan inti dari *good governance*.

Rikki Pratama dan Firman Rahmadoni (2023), yang juga menemukan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap *good governance*. Meskipun penelitian Pratama dan Rahmadoni berfokus pada kualitas laporan keuangan sebagai dampak akhir, kesamaan dalam menemukan hubungan positif antara pengendalian internal dan *good governance* memperkuat temuan ini. Demikian pula, penelitian Afifah Muannis Hanifah, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty (2023), meskipun berfokus pada *Good Corporate Governance* (GCG), menegaskan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif berkontribusi positif terhadap penerapan GCG. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar pengendalian internal dalam menciptakan lingkungan yang terkontrol dan akuntabel berlaku lintas sektor, baik di pemerintahan maupun korporasi, dalam mewujudkan tata kelola yang baik

## **2. Pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.**

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Dengan nilai koefisien sebesar 0.390 dan tingkat signifikansi 0.000 ( $p < 0.05$ ), hasil ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik secara langsung meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah. Koefisien positif menunjukkan hubungan searah: semakin optimal prinsip-prinsip *good governance* diterapkan, semakin baik pula kinerja yang dicapai.

Hasil ini menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan

efisiensi dalam mendorong kinerja. Ketika pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (partisipasi), menyediakan informasi yang mudah diakses (transparansi), dan bertanggung jawab atas tindakan mereka (akuntabilitas), hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah. Kepercayaan ini dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam program-program pembangunan, yang secara tidak langsung meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut. Selain itu, penegakan hukum dan responsivitas memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara adil dan tepat waktu, yang merupakan indikator kunci dari kinerja pemerintah yang baik. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan fokus pada hasil (*output* dan *outcome*) juga merupakan elemen *good governance* yang secara langsung meningkatkan kinerja.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Tami Nisita Rahmani (2023), yang juga mengkaji pengaruh *good government governance* terhadap kinerja dinas pemerintah kota. Meskipun penelitian Rahmani menemukan bahwa *good government governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial, perbedaan konteks dan indikator yang digunakan mungkin menjelaskan variasi ini. Namun, secara umum, literatur mendukung gagasan bahwa tata kelola yang baik adalah prasyarat untuk kinerja sektor publik yang optimal. Penelitian Mattoasia, Didiet Pratama Musueb, dan Yaman Rauf (2021), yang menemukan pengaruh positif sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah, secara implisit mendukung temuan ini karena pengendalian internal merupakan fondasi bagi *good governance*, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja.

### **3. Pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.**

Berdasarkan hasil analisis jalur, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,556 dengan nilai p-value  $0,000 < 0,05$ , yang berarti bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, maka kinerja pemerintah daerah juga akan meningkat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mattoasi dkk. (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan kontribusi determinasi sebesar 48,7%. Demikian juga, penelitian Rahmani (2023) menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting yang mendukung tercapainya kinerja pemerintah daerah yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa pengendalian internal memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja sektor publik.

Dalam konteks Kabupaten Tanah Datar, pengaruh tersebut dapat dijelaskan melalui peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sistem pengendalian internal yang dijalankan masih mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam upaya pencegahan penyimpangan administrasi, peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta pemantauan efektivitas program daerah. Namun demikian, hasil ini juga mengindikasikan bahwa kontribusi pengendalian internal belum optimal karena masih terdapat ruang perbaikan, terutama terkait kualitas SDM, dukungan anggaran, dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar diterima. Artinya, semakin kuat pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan kondisi kelembagaan yang ada.

#### **4. Pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan *good governance* melalui kinerja pemerintah daerah.**

Salah satu temuan krusial dari penelitian ini adalah adanya pengaruh tidak langsung yang signifikan dari pengendalian internal dengan kinerja pemerintah daerah berperan sebagai variabel mediasi terhadap *good governance*. Hasil perhitungan menunjukkan besarnya koefisien pengaruh tidak langsung adalah 0.355, dengan nilai signifikansi yang sangat kecil, yaitu 0.00004685 ( $p < 0.05$ ). Angka signifikansi ini secara kuat menegaskan keberadaan pengaruh tidak langsung yang substansial. Lebih lanjut, koefisien pengaruh tidak langsung yang bertanda positif mengindikasikan bahwa hubungan mediasi ini bersifat positif.

Interpretasi dari temuan ini adalah bahwa pengendalian internal tidak hanya secara langsung meningkatkan *good governance*, tetapi juga secara tidak langsung melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah. Mekanismenya adalah sistem pengendalian internal yang kuat (misalnya, melalui pemantauan yang ketat, penilaian risiko yang akurat, dan aktivitas pengendalian yang efektif) akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah daerah. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ini tercermin dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, seperti pengelolaan anggaran yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih responsif, dan pencapaian target pembangunan yang lebih optimal. Kinerja yang lebih baik ini, akan memperkuat prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas (karena kinerja yang terukur lebih mudah dipertanggungjawabkan), transparansi (karena proses yang efisien lebih mudah diaudit), dan partisipasi (karena masyarakat lebih percaya pada pemerintah yang berkinerja baik). Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah bertindak sebagai jembatan atau mediator yang memperkuat hubungan antara pengendalian internal dan *good governance*.

Temuan ini memberikan nuansa penting pada pemahaman hubungan antar variabel. Meskipun penelitian terdahulu seperti Pratama dan Rahmadoni (2023) serta Mattoasia, Musueb, dan Rauf (2021) telah

mengidentifikasi hubungan langsung antara pengendalian internal dengan *good governance* dan kinerja pemerintah daerah, penelitian ini menambahkan dimensi mediasi yang menjelaskan bagaimana peningkatan kinerja pemerintah daerah menjadi saluran penting bagi pengendalian internal untuk mewujudkan *good governance* yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam penguatan pengendalian internal tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga manfaat berjenjang melalui peningkatan kinerja operasional yang kemudian memfasilitasi tata kelola yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPKD Kabupaten Tanah Datar, diketahui bahwa Inspektorat secara rutin melakukan kunjungan langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap bulannya. Keterlibatan aktif Inspektorat ini secara langsung memengaruhi kinerja pemerintah daerah, yang terlihat dari proses pemeriksaan yang mereka lakukan. Setiap kali Inspektorat melakukan pemeriksaan, OPD diwajibkan menyiapkan dokumen dan bahan-bahan yang akan direviu, dan hasil dari reviu serta pemeriksaan ini berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Selain itu, sistem yang dikembangkan oleh Inspektorat juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD di Kabupaten Tanah Datar, mendukung efisiensi dan efektivitas tata kelola.

pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Pengendalian internal berperan sebagai instrumen untuk memastikan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan, efektif, efisien, serta terhindar dari penyimpangan, sementara *good governance* menjadi landasan nilai yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi, di mana pengendalian internal tanpa didukung tata kelola yang baik akan cenderung bersifat administratif, sedangkan *good governance* tanpa pengendalian internal yang kuat akan sulit diwujudkan secara konsisten. Oleh karena itu, kombinasi pengendalian internal yang efektif dengan penerapan *good governance* yang optimal terbukti mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah, baik dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, maupun pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap *good governance* dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *good governance* di Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Ini berarti bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan, semakin tinggi pula kualitas penerapan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Penerapan *good governance* terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik secara langsung meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah.
3. Pengendalian internal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Semakin baik penerapan pengendalian internal, maka semakin meningkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
4. Pengendalian internal secara tidak langsung berpengaruh signifikan dan positif melalui kinerja pemerintah daerah terhadap *good governance*. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja pemerintah daerah berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara pengendalian internal dan *good governance*.

Dengan Demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan fondasi utama yang secara langsung berkontribusi pada terwujudnya *good governance*. Selanjutnya, penerapan *good governance* yang efektif secara langsung meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Kinerja

pemerintah daerah juga berperan sebagai jembatan mediasi, memperkuat dampak tidak langsung pengendalian internal terhadap *good governance*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan bagi berbagai pihak terkait, yaitu:

### **1. Bagi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar**

Mengingat pengaruh signifikan pengendalian internal terhadap *good governance* dan kinerja pemerintah daerah, Inspektorat perlu terus memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya dalam aspek sumber daya manusia dan anggaran, agar kegiatan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan proaktif. Fokus pada peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui prinsip-prinsip *good governance* akan secara tidak langsung turut memperkuat tata kelola pemerintah, sehingga perlu adanya sinergi antara upaya pengawasan dan peningkatan kapasitas OPD.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain yang mungkin memengaruhi *good governance* dan kinerja pemerintah daerah, mengingat masih ada 31.6% variabilitas *good governance* yang belum dijelaskan dalam model ini. Penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan pendekatan kualitatif atau campuran untuk menggali lebih dalam mekanisme dan tantangan spesifik dalam implementasi pengendalian internal dan *good governance* di tingkat operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danar, O.R. 2022. *Teori Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Darma, B. 2021. *Statiska Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Jakarta: GUEPEDIA.
- Djaali 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Edowai, M., Abubakar, H. & Said, M. 2021. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. Pascasarjana Universitas Bosowa, Gowa: CV. Berkah Utami.*
- Fitrah, Muh & Luthfiyah. 2018. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Suka Bumi: CV Jejak.
- Ghodang, H. 2020. *Path Ananlisys (Analisis Jalur) Konsep dan Praktik dalam Penelitian*. Medan: PT Penerbit Mitra Group.
- Handayani, L.T. 2023. *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. Jakarta: PT.Scifintech Andrew Wijaya.
- Hanifah, A.M., Kuntadi, C. & Pramukty, R. 2023. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Komitmen Manajemen Terhadap Good Corporate Governance. *Jurnal Economina*, 2(6): 1318–1330.
- Hidayat, S. 2021. *Akuntansi Pemerintah*. Padang: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Junaedi, A. 2020. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan*. Padang: Samudra Biru.
- Kewo, C.L. 2024. *Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik, Teori dan Aplikasi*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Mattoasi, M., Musue, D.P. & Rauf, Y. 2021. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2): 100–109.
- Mayasari, R. 2022. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Dan Model Penilaiannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muda, I., Maulana, W., Siregar, H.S. & Indra, N. 2018. The analysis of effects of good corporate governance on earnings management in Indonesia with panel data approach. *Iranian Economic Review*, 22(2): 599–625.

- Nasution, U.H., Junaidi, L.D. & Prayoga, J. 2024. *Metode Penelitian*. Medan: Serasi Media Teknologi.
- Natsir, S., Arsyad, M. & Dinhi, Z.D. 2024. *Audit Dasar*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Nurriani, F. 2024. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance Dengan Kinerja Organisasi Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Oki, K. 2023. *Otonomi dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Majalengka: PT Pusat Literasi Dunia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern*. Jakarta.
- Pratama, E.R. & Rahmadoni, F. 2023. Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan. *AKDBB Journal of Economics and Business (AJEB)* 2(1): 10–24.
- Priyatno, D. 2024. *Teknik Dasar untuk Analisis Data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahmani, T.N. 2023. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Good Government Governance Terhadap Kinerja Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Journal of Economics, Finance, and Social Science Review*, 1(1): 23–37.
- Ruwaidha, H. & Kundati, C. 2024. Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Manajemen Dalam Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(2): 477–487.
- Sari, M. 2024. *Monograf Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Medan: umsu press.
- Siagian, N. & Silviani, I. 2023. *Metodologi Kuantitatif*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Solikhudin, M. 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqāṣid al-Sharī'ah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Supriadi, I. 2022. *Riset Akuntansi Keprilakuan: Penggunaan Smartpls dan Spss Include Macro Andrew F.Hayes*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syofyan, E. 2021. *Good Corporate Governance (Gcg)*. Malang: Unisma Press.
- Tambunan, D. 2024. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan Daerah Pangaribuan Tapanuli Utara. *Skripsi*. Universitas Medan Area. Medan.
- Tuanakotta 2019. *Audit Internal Berbasis Risiko*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wibowo, F.X.P. 2022. *Statistika Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 25*. Jakarta: Penerbit Salemba.